

BRBIH



2025

**LAPORAN
TAHUNAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahun 2025 ini dapat disusun tepat pada waktunya. Laporan ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Operasional Kegiatan di Balai Riset Budidaya Ikan Hias.

Laporan ini merupakan pelaksanaan kegiatan Balai Riset Budidaya Ikan Hias selama tahun anggaran 2025. Laporan ini juga mencakup penyerapan anggaran tahun 2025 untuk masing-masing output dan komponen kegiatan. *Tak ada gading yang tak retak*, meskipun laporan ini jauh dari kesempurnaan kami berharap Laporan ini mampu merepresentasikan kegiatan Balai Riset Budidaya Ikan Hias dan capaian hasilnya selama tahun 2025.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran maka program kegiatan di Balai Riset Budidaya Ikan Hias sudah dapat dikerjakan dengan baik. Diharapkan kegiatan-kegiatan yang ada dapat terlaksana secara maksimal sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Ucapan terima kasih yang tulus juga disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan berpartisipasi dalam penyusunan laporan tahunan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dijadikan acuan dalam upaya perencanaan kegiatan dan anggaran di tahun berikutnya.

Depok, 31 Desember 2025

Kepala Balai,



Ioni Haryadi D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 LATAR BELAKANG.....	7
1.2 TUJUAN	8
BAB II METODE PELAKSANAAN KEGIATAN.....	9
BAB III HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	Error! Bookmark not defined. 9
BAB IV PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAKLANJUT	74
BAB V PENUTUP.....	75
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BRBIH	7
Gambar 2. Grafik Keragaan Pegawai BRBIH	10
Gambar 3. Tangkapan Layar Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja BRBIH	54
Gambar 4. Tangkap layar pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pegawai BRBIH Tahun 2024, sumber website ropeg.kkp.go.id	56
Gambar 5. NKO BRBIH Tahun 2025	64
Gambar 6. Grafik Realisasi Anggaran	67
Gambar 7. Grafik persentase capaian realisasi keuangan anggaran belanja.....	68
Gambar 8. Piagam Penghargaan dengan Nilai IKPA Terbaik	69
Gambar 9. Piagam Penghargaan Kategori Satker dengan Realisasi Penggunaan UP KKP	70
Gambar 10. Piagam Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Produk Layanan Pemanfaatan Aset BRBIH.....	10
Tabel 2. Daftar Produk Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis	10
Tabel 3. Daftar Komponen pada Output Layanan Perkantoran.....	23
Tabel 4. Kegiatan Sewa Aset BRBIH Tahun 2025.....	29
Tabel 5. Workshop/ Webinar Tahun 2025	30
Tabel 6. Data Program Magang Tahun 2025.....	34
Tabel 7. Jumlah Peserta Kunjungan Tahun 2025	35
Tabel 8. Jumlah Pengaduan di Tahun 2025.....	37
Tabel 9. Pelaporan Gratifikasi ke KPK.....	38
Tabel 10. Nilai SKM Tahun 2025.....	38
Tabel 11. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan	39
Tabel 12. Nilai Interval dan Kriteria IPKP.....	39
Tabel 13. Rata-rata skor peringkat pada setiap ruang lingkup pengukuran IPAK.....	41
Tabel 14. Rekapitulasi Permintaan data dan informasi di Tahun 2025	43
Tabel 15. Perbandingan Jumlah Followers per Desember 2025.....	44
Tabel 16. Artikel pada Website 2025	46
Tabel 17. Daftar Kerjasama di Tahun 2025	47
Tabel 18. Jumlah Lalu Lintas Persuratan	50
Tabel 19. Rincian pembayaran belanja pegawai per jenis ASN	50
Tabel 20. Realisasi belanja pada komponen operasional dan pemeliharaan kantor	51
Tabel 21. Kenaikan Pangkat Pegawai	55
Tabel 22. Pegawai Izin Belajar	55

Tabel 23. Usulan Pegawai Tugas Belajar/Izin Belajar Tahun 2025	56
Tabel 24. PPPK pada Satker BRBIH per 31 Desember 2025	57
Tabel 25. Proses Mutasi Pegawai.....	57
Tabel 26. Pegawai penerima penghargaan Satyalancana Karya Satya	58
Tabel 27. Pegawai yang mencapai BUP	59
Tabel 28. Rekapitulasi Cuti ASN.....	59
Tabel 29. Rekap Perjalanan Dinas ASN	59
Tabel 30. Rekap Peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.....	61
Tabel 31. Sasaran, Indikator Kinerja dan Target pada PK BRBIH Tahun 2025	62
Tabel 32. Daftar Revisi Anggaran berdasarkan Jenis Revisi	63
Tabel 33. Komposisi Anggaran Belanja Tahun 2025	66
Tabel 34. Daftar UP, GUP dan TUP selama TA 2025	67
Tabel 35. Daftar Revisi Anggaran berdasarkan Jenis Revisi	71

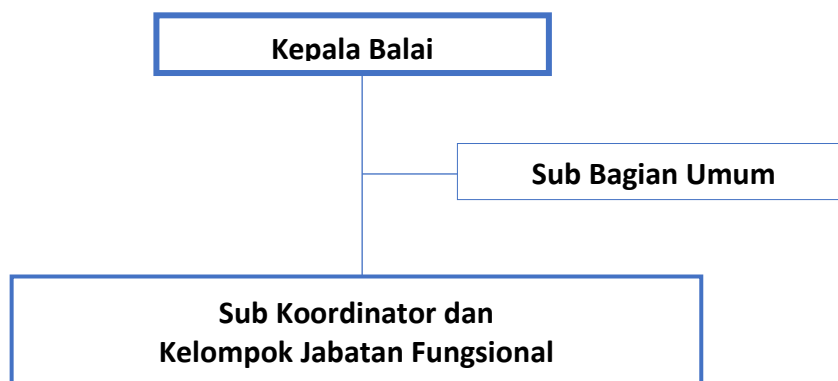
BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Balai Riset Budidaya Ikan Hias merupakan salah satu satuan kerja dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) yang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77/ PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) memiliki tugas melaksanakan kegiatan riset budidaya ikan hias air tawar, ikan hias air payau, dan ikan hias laut berdasarkan lingkungan fisiknya.

Dalam melaksanakan tugas, BRBIH menyelenggarakan berbagai fungsi yang diantaranya adalah a) Menyusun rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan; b) melaksanakan riset perikanan budidaya ikan hias air tawar, ikan hias air payau, dan ikan hias laut yang meliputi perbenihan, domestikasi, dan pemuliaan sumber daya plasma nutfah ikan hias, nutrisi, dan teknologi pakan, Kesehatan ikan lingkungan serta teknologi budidaya ikan hias; c) mengembangkan teknologi perikanan budidaya ikan hias air tawar, ikan hias air payau, dan ikan hias laut; d) memberikan layanan teknis, jasa, informasi, komunikasi dan Kerjasama riset; e) mengelola prasarana dan sarana riset; dan f) melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga. Namun seiring dengan penerapan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN yang menegaskan unit riset pemerintah diintegrasikan ke BRIN, maka sebagaimana tahun 2022 s.d 2024, BRBIH tidak melaksanakan kegiatan terkait dengan riset di tahun 2025.

Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut maka BRBIH memiliki susunan Organisasi yang terdiri atas a) Subbagian Umum b) Kelompok Jabatan Fungsional, sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi BRBIH

Dalam rangka menjalankan roda organisasi, melalui Program Dukungan Manajemen, diawal tahun 2025 BRBIH mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 10.969.977.000. Kebijakan efisiensi anggaran pada tahun ini mengakibatkan pemotongan anggaran di sebagian besar Satuan Kerja (Satker) Lingkup KKP termasuk BRBIH, sehingga tercatat di akhir tahun anggaran, pagu BRBIH adalah sebesar Rp 7.961.516.000,00. Pagu ini tersebar pada Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang mencakup 3 (tiga) Komponen Rincian Output (KRO) yaitu Layanan Dukungan Manajemen Internal, Layanan Manajemen SDM Internal dan Layanan Manajemen Kinerja Internal.

Selama tahun 2025, BRBIH telah melaksanakan kegiatan dengan output berupa layanan dan dokumen. Dalam mencapai output yang telah ditetapkan, BRBIH melakukan sejumlah strategi pencapaian dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan. Melalui laporan tahunan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kegiatan di BRBIH pada rentang waktu Januari sampai dengan Desember 2025.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Laporan Tahunan 2025 adalah untuk mengevaluasi capaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan tugas selanjutnya di tahun yang akan datang.

BAB II METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

BRBIH melaksanakan kegiatan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-032.12.2.403830/2025 dan Rincian Kertas Kerja (RKK) Satker BRBIH Tahun 2025. Pagu anggaran yang dialokasikan pada kegiatan ini adalah sebesar Rp 7.961.516.000 (tujuh miliar sembilan ratus enampuluh satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah) dengan komposisi anggaran belanja pegawai sebesar Rp 4.559.977.000 (57,28%), belanja barang sebesar Rp 3.401.539.000 (42,72%), dan tidak terdapat alokasi belanja modal pada DIPA dan RKK tahun 2025.

Pada RKK BRBIH tahun 2025 tertuang Rincian Output (RO) 7 (tujuh) dari 3 (tiga) KRO. Besaran anggaran pada masing-masing RO beserta metode pelaksanaan kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

1. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

Output dari Layanan ini adalah 1 (satu) layanan, dengan anggaran sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Komponen pada layanan ini berupa Pelayanan Hubungan Masyarakat Riset Perikanan. Metode pengadaan barang pada layanan ini adalah swakelola, yang mencakup pada pengadaan bahan berupa souvenir dan barang persediaan berupa ATK dan bahan komputer. Layanan ini merujuk pada pada layanan yang meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. Perumusan kebijakan di bidang hubungan masyarakat dan informasi;
- b. Pengumpulan data dan informasi mengenai pendapat, sikap dan kegiatan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah;
- c. Publikasi dan dokumentasi kegiatan dan kebijakan Kementerian/ Lembaga; dan
- d. Pelayanan informasi kebijakan dan kegiatan Kementerian/ Lembaga.

Pelaksanaan kegiatan pada layanan hubungan masyarakat dan informasi dikelola oleh bagian Pelayanan Teknis BRBIH. Dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi dan *good governance* (pemerintahan yang baik), pelayanan teknis merupakan salah satu bagian yang penting dilakukan oleh BRBIH. Pelayanan Teknis yang dilakukan BRBIH selama tahun 2025 meliputi kegiatan :

- **Pelayanan Publik**

Jenis layanan publik yang tersedia di BRBIH sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan. Produk pelayanan di BRBIH dengan jenis pelayanan berupa:

1) Pemanfaatan Aset

Standar Pelayanan dapat di lihat di :

https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/Standar_Layanan_Pemanfaatan_Aset_.pdf

Tabel 1 Daftar Produk Layanan Pemanfaatan Aset BRBIH

No	Produk Layanan
1	Sewa Pemanfaatan Aset Jangka Panjang
2	Sewa lapangan
3	Sewa ruang pertemuan
4	Sewa Mess

2) Konsultasi dan Bimbingan Teknis

Standar Pelayanan dapat di lihat di:

https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/Standar_Layanan_Konsultasi_dan_Bimbingan_Teknis.pdf

Tabel 2 Daftar Produk Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis

No	Produk Layanan	
1.	Workshop/Webinar Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Sertifikat)	Budidaya Ikan, Pembuatan Pakan, Aquascape
2.	Konsultasi dan Bimbingan Teknis dengan Program Magang / PKL dan Penelitian (Surat Keterangan dan Sertifikat)	Budidaya Ikan, Pembuatan Pakan, Aquascape
3.	Konsultasi Budidaya Ikan dan Pembuatan Pakan dengan Instruktur dan/atau Teknisi (Tanpa memperoleh sertifikat)	
4.	Konsultasi Pengenalan Ikan dan Pembuatan Pakan untuk Pelajar (Tanpa memperoleh sertifikat)	

Persyaratan Pelayanan

1. Mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias;
2. Persyaratan Umu:
 - 1) Peserta mengajukan permohonan resmi untuk jenis produk layanan yang diinginkan
 - 2) Jam pelayanan pada BRBIH: Waktu pelayanan setiap hari kerja (kecuali hari libur) yaitu:

Hari	Jam Layanan	Istirahat
Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jumat	08.00 - 16.30 WIB	11.30 - 13.00 WIB

• Pengaduan

Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian laporan atau keluhan oleh masyarakat yang mengetahui atau mengalami secara langsung adanya dugaan pelanggaran dan/atau tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan instansi atau lembaga pemerintah. Penanganan pengaduan masyarakat harus dilaksanakan secara cepat, tepat, dan tuntas sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), guna mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi dan *good governance*.

Pengaduan masyarakat merupakan sumber informasi yang sangat berharga dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui pengaduan yang disampaikan, instansi penyelenggara pelayanan publik memperoleh masukan yang konstruktif untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan layanan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu, pengaduan memungkinkan permasalahan yang terjadi dapat diidentifikasi dan ditangani secara lebih cepat, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Dalam rangka evaluasi penanganan pengaduan masyarakat, seluruh proses harus berorientasi pada kebutuhan dan tingkat kepuasan penerima layanan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja, daya saing, serta mutu pelayanan publik yang selaras dengan Visi dan Misi Balai Riset Budidaya Ikan Hias.

Sebagai instansi penyelenggara pelayanan publik, Balai Riset Budidaya Ikan Hias wajib melaksanakan tindak lanjut terhadap setiap pengaduan masyarakat secara bertanggung jawab dan akuntabel sebagai upaya nyata dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan penerapan prinsip *good governance*. Evaluasi terhadap penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk:

- a) meninjau perkembangan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penanganan pengaduan masyarakat;
- b) membantu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi beserta faktor penyebabnya;
- c) mendorong terciptanya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- d) meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan; serta

- e) mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik.

Adapun pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat berlandaskan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2020 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Balai Riset Budidaya Ikan Hias telah melaksanakan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat secara berkala, khususnya terkait kegiatan Pelayanan Publik Pendidikan dan Pelatihan Teknis.

Dasar pelaksanaan penanganan pengaduan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beberapa sarana pengaduan yang ada di BRBIH diantaranya:

1. Kotak Pengaduan/Kotak Saran : Berada di Ruang layanan PPID
2. Website LAPOR : <https://www.lapor.go.id/>
3. Website Whistleblower : <https://wbs.kkp.go.id/>
4. Nomor Pengaduan KKP, WhatssApp : 0851-7160-4719
5. Whistle Blowing KKP : <https://wbs.kkp.go.id/>
6. Email Pengaduan : pengaduan.brbihtepok@kkp.go.id/pengaduan@kkp.go.id
7. Melalui Media Sosial
 - Instagram: [bppsdm_brbihtepok](#)
 - X: [bppsdm_brbihtepok](#)
 - Facebook: [Bppsdm Brbihtepok](#)
 - Tik Tok: [bppsdm_brbihtepok](#)
 - Snack Video: [bppsdm_brbihtepok](#)
8. Website Balai: <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-riset-budidaya-ikan-hias-tepok/>
9. Ruang Pengaduan : Balai Riset Budidaya Ikan Hias, Ruang PPID Jl. Perikanan No. 13 Pancoran Mas Kota Depok, Telepon : (021) 7520482

- **Gratifikasi**

Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) melaksanakan kegiatan Pengendalian Gratifikasi. untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta membangun aparatur yang bersih dan berintegritas, Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program penguatan integritas dan pencegahan tindak korupsi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan budaya kerja yang jujur, transparan, dan akuntabel di lingkungan BRBIH. Undang-undang memberikan

kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat risiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pegawai dapat melakukan/melaporkan gratifikasi dalam bentuk laporan Gratifikasi. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor. Dalam rangka optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi melalui gratifikasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang dibentuk atau ditunjuk oleh pimpinan instansi untuk melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan kerja. Dalam pelaksanaannya, UPG berperan sebagai perantara antara pegawai dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pelaporan penerimaan atau penolakan gratifikasi. Pelapor Gratifikasi, yang selanjutnya disebut Pelapor, adalah Pegawai atau Penyelenggara Negara yang menerima atau menolak gratifikasi dan menyampaikan laporannya kepada KPK secara langsung atau melalui Unit Pengendali Gratifikasi sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi di BRBIH meliputi beberapa bentuk kegiatan, antara lain sosialisasi kebijakan pengendalian gratifikasi, pembentukan dan penguatan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), penyebarluasan informasi melalui media internal, serta pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Kegiatan ini dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KKP, serta arahan dari Inspektorat Jenderal KKP.

Ruang Lingkup

Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai atau Penyelenggara Negara meliputi:

- a) Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
- b) Gratifikasi yang tidak wajib di laporkan

Yang diatur lebih detail pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- **Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)**

Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, dan pelayanan administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok sebagai Unit Pelayanan Publik berkomitmen memberikan layanan yang optimal sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021.

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk memperoleh umpan balik dari pengguna layanan guna mengukur tingkat kepuasan masyarakat serta mengevaluasi kualitas dan kinerja pelayanan secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil SKM menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan publik. Melalui SKM, diharapkan tercapai pelayanan prima yang mampu memenuhi harapan masyarakat, mendorong partisipasi publik, meningkatkan inovasi penyelenggara layanan, serta memberikan gambaran objektif mengenai kinerja unit pelayanan publik.

Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dilaksanakan melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Survey Kepuasan Masyarakat ini menggunakan kuesioner yang diisi oleh pelanggan penerima layanan publik untuk. Kuesioner dibagikan secara elektronik (e-survei) menggunakan tools SUSAN yang dapat diakses melalui link <http://ptsp.kkp.go.id/skm> atau barcode melalui smartphone, laptop dan pc dengan akses internet, yang hasilnya akan masuk secara otomatis kedalam database aplikasi SUSAN. Adapun penghitungan Survey Kepuasan Masyarakat ini dilakukan per Triwulan. Untuk dasar penilaian yang digunakan mengacu pada lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB No. 14 tahun 2017, adapun indikator yang dinilai diantaranya adalah:

1. Kesesuaian Pelayanan
2. Kemudahan Prosedur Pelayanan
3. Kecepatan Waktu Pelayanan
4. Kewajaran Biaya Pelayanan
5. Kesesuaian Produk Pelayanan
6. Kompetensi Petugas Pelayanan
7. Perilaku Petugas Pelayanan
8. Kualitas Sarana dan Prasarana
9. Penanganan Pengaduan Pelayanan

• **Survey Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)**

BRBIH sebagai lembaga negara merupakan lembaga penyelenggara layanan publik. Untuk itu BRBIH berkomitmen untuk menyelenggarakan layanan publik yang berkualitas dan anti korupsi sekaligus adaptif atas perubahan. Untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang diselenggarakan, BRBIH menyelenggarakan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK). Hasil survei SPKP dan SPAK diolah dalam bentuk Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Pada dasarnya pedoman pelaksanaan Survei pelayanan publik dan persepsi korupsi sudah ditetapkan di dalam Peraturan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PER-ITJEN/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi/wilayah Birokrasi Bersih dan melayani pada unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Survey IPKP dan IPAK ini diperlukan untuk mengetahui seberapa baik penyelenggaraan layanan yang diselenggarakan BRBIH baik dari proses maupun dari segi pelayanan yang telah diberikan. Hasil penilaian ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dalam rangka usaha meningkatkan mutu pelayanan, diperlukan adanya perubahan-perubahan, terutama restrukturisasi tim strategi pelayanan. Strategi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai dan akan menghasilkan outcome memuaskan yang dapat dilihat dari hasil Survei, untuk itu perlu dilaksanakan Survei Pelayanan Publik dan Persepsi Korupsi. Survei dilaksanakan secara periodik adalah survei yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Survei dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Jumlah responden/sampel penelitian menggunakan tabel atau rumus cukup bervariasi. Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan tujuan

Survei atau data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari Krejcie dan Morgan. Jumlah responden pada survei ini berjumlah 65 orang.

Lokasi dan pengumpulan data diambil dari responden/sampel/pemohon pelayanan di Balai Riset Budidaya Ikan Hias secara langsung. Berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, pengumpulan data/Survei dilaksanakan sejak bulan Januari s/d Oktober 2025

- **Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi**

Selain memberikan pelayanan informasi dengan datang langsung, penyediaan serta pelayanan informasi juga dilakukan melalui saluran sebagai berikut:

Telepon	:	(021) 7520482
WhatsApp	:	0851-7160-4719
Website	:	https://ppid.kkp.go.id/ https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-riset-budidaya-ikan-hias-depok/
Media Sosial	:	Instagram: bppsdm_brbi.depok Facebook: Bppsdm Brbi Depok Tiktok: bppsdm_brbi Twitter X: BRBIH Depok Youtube: bppsdm_brbi Snack Video: bppsdm_brbi.depok
Email	:	publikasi.bppbi@gmail.com

Pemenuhan permohonan informasi dan data yang diajukan oleh pemohon ke PPID baik oleh pemohon yang datang langsung atau yang disampaikan melalui media lainnya, langsung direspon oleh petugas yang bertugas di ruang sekretariat PPID. Jika informasi atau data yang dimohon belum tersedia di website dan di ruang PPID, maka petugas PPID mengadakan koordinasi dengan unit kerja terkait, guna memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta.

- **Pelatihan Untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia**

Pelayanan satu pintu membawa perubahan pelayanan sehingga lebih baik dan ringkas, maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kriteria kompeten, trampil, cerdas, mempunyai kemauan dan kemampuan belajar.

Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan harus memiliki kompetensi sesuai kualifikasi bidang ilmunya, inovasi kreatif dan budaya kerja baik sehingga professional dalam menjalankan tugasnya. Mutu pelayanan dari pegawai ASN yang rendah akan dikaitkan dengan professional pegawai tersebut. Tidak berkualitasnya kerja pegawai ASN karena tidak berimbangannya perbandingan antara jumlah pegawai ASN dengan stakeholdersnya, disamping kompetensi yang rendah dari pegawai ASN tersebut. Pegawai ASN mempunyai peran yang sangat dalam menentukan kualitas pelayanan, oleh karena itu perlu meningkatkan kualitas ASN yang mempunyai kompetensi dilengkapi keterampilan baik di bidang teknologi maupun pelayanan dengan cara memberikan pelatihan, lokakarya atau seminar, dan mengikuti bimbingan teknis.

Era Globalisasi saat ini sangat menuntut instansi untuk berubah secara dinamis, sehingga menuntut kemampuan pegawai menangkap perubahan yang terjadi baik internal maupun eksternal, menganalisis dampak terhadap organisasi dan menyusun strategi. Untuk itu perlu pengembangan potensi sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif serta mempunyai kompetensi agar dapat memberikan pelayanan prima dan bernilai. Kegiatan Pelayanan Teknis di BRBIH dalam rangka meningkatkan kompetensi salah satunya melakukan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM baik melalui seminar, workshop dan forum diskusi. Pelaksanaan kegiatan dapat mengikuti acara dari Pusat maupun instansi lain baik dari dalam kementerian maupun luar kementerian.

- **Kehumasan Pengelolaan Website dan Media Sosial**

Pengelolaan website dan media sosial Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas promosi, penyebaran informasi, dan pelaksanaan fungsi kehumasan secara terencana, intensif, dan berkelanjutan. Website dan media sosial berperan sebagai sarana komunikasi publik resmi yang terintegrasi dengan website Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), guna mendukung keterbukaan informasi publik serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat secara transparan, akurat, dan cepat. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan platform digital menjadi kebutuhan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), karena mampu memperluas jangkauan komunikasi, mempercepat penyampaian informasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui penyajian informasi yang mudah diakses, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelolaan website dan media sosial diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, memperkuat

citra dan kepercayaan publik, serta mendukung diseminasi hasil riset dan inovasi budidaya ikan hias secara efektif dan berkelanjutan.

Penyusunan Laporan Media Sosial Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban, dokumentasi, dan evaluasi atas pengelolaan website dan media sosial dalam mendukung penyebaran informasi publik, promosi kegiatan, serta pelaksanaan fungsi kehumasan. Laporan ini bertujuan untuk mewujudkan komunikasi digital yang efektif, transparan, dan partisipatif dengan tujuan:

- (1) mempermudah akses informasi publik secara cepat dan luas;
- (2) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah;
- (3) mendukung transformasi digital dalam pelayanan publik;
- (4) memperkuat komunikasi dan keterlibatan publik;
- (5) meningkatkan efisiensi penyebaran informasi dan sosialisasi program;
- (6) menyediakan informasi darurat secara cepat dan real-time; serta
- (7) mendukung pembentukan citra dan reputasi positif Balai Riset Budidaya Ikan Hias sebagai instansi pemerintah yang profesional, modern, informatif, dan responsif.

Pada tahun 2025, konten media sosial BRBIH telah mengupload sekitar 1500 konten dan pengunjung di website PPID BRBIH sebanyak 81.210 dimana website PPID baru dapat diakses pada Oktober 2024, adapun link dapat diakses di:

Website	:	https://ppid.kkp.go.id/ https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-ri-set-budidaya-ikan-hias-depok/
Media Sosial	:	Instagram: bppsdm_brbi-h.depok Facebook: Bppsdm Brbi-h Depok Tiktok: bppsdm_brbi-h Twitter X: BRBIH Depok Youtube: bppsdm_brbi-h Snack Video: bppsdm_brbi-h.depok

Media sosial BRBIH (Balai Riset Budidaya Ikan Hias) merupakan salah satu sarana komunikasi strategis dalam menyampaikan informasi, inovasi, dan pelatihan kepada masyarakat luas, khususnya pelaku budidaya ikan hias, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait. Melalui berbagai platform media sosial, BRBIH berperan aktif dalam menyebarluaskan edukasi teknis, teknologi budidaya, serta kegiatan kelembagaan secara cepat, terbuka, dan mudah diakses.

Keberadaan media sosial BRBIH tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai ruang interaksi dan engagement antara institusi dengan publik. Respons, komentar, dan tingkat partisipasi audiens menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas penyampaian pesan serta relevansi konten yang dipublikasikan. Oleh karena itu, pengelolaan media sosial yang terarah dan berbasis data menjadi kebutuhan utama.

Berdasarkan peran tersebut, analisis media sosial BRBIH diperlukan untuk mengukur kinerja konten, jangkauan audiens, serta pola interaksi pengguna. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi komunikasi yang lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan tujuan BRBIH untuk Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) budidaya ikan hias.

- **Pengumpulan Artikel untuk Kegiatan di Website**

Balai Riset Budidaya Ikan Hias berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja salah satu fungsinya adalah pelayanan informasi dan komunikasi. Informasi sangat dibutuhkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan, BRBIH dalam rangka menyampaikan informasi baik mengenai ikan hias maupun kegiatan, membuat kegiatan terkait dengan pembuatan artikel yang di informasikan melalui website. Meskipun Kominfo tidak merinci jumlah pengguna media sosial secara spesifik, laporan dari We Are Social mencatat bahwa pada Januari 2024, terdapat sekitar 139 juta identitas pengguna media sosial di Indonesia, yang setara dengan 49,9% dari total populasi nasional Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengumumkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Dari hasil survei penetrasi internet Indonesia 2024 yang dirilis APJII, maka tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,5%. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka ada peningkatan 1,4%. Penggunaan internet ini mencerminkan meningkatnya keterbukaan informasi dan penerimaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan perubahan menuju masyarakat informasi.

Pada saat ini pemerintah telah memanfaatkan teknologi informasi (internet) dalam menunjang aktifitas kegiatan pemerintahannya, pemanfaatan internet disebut dengan electronic government. Adapun tujuan dari penggunaan internet untuk memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan publik secara transparan, efektif, efisien dan mudah mendapatkan informasi. Berdasarkan hal tersebut perlu bagi Balai Riset Budidaya Ikan Hias melalui website untuk memuat artikel, sehingga masyarakat mendapat informasi dengan membaca tulisan baik karya ilmiah maupun mengenai

administrasi perkantoran. Artikel yang dibuat berdasarkan fakta, data dan opini yang dipublikasikan di media sosial. Diharapkan artikel yang dibuat dapat mengedukasi, memberi pengetahuan dan menanggapi suatu permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat sekaligus memberikan solusi dari permasalahan tersebut.

Penulisan artikel sebagai media learning management dan informasi sehingga dapat meningkatkan kapasitas pengetahuan bagi masyarakat. Dengan tujuannya informasi tersampaikan pada masyarakat sehingga dapat menambah pengetahuan dan keterampilan. Target/sasaran yang ingin dicapai adalah Pembudidaya Ikan Hias, starup ikan hias, Instansi pemeritah, Mahasiswa/Mahasiswi dan Penyuluh. Pedoman tata cara dalam penulisan artikel sebagai berikut:

Pedoman Umum

- ✓ Naskah merupakan ringkasan hasil penelitian atau studi Pustaka
- ✓ Naskah ditulis dengan huruf Time New Roman font 12. Panjang naskah sekitar 3 – 7 halaman dan diketik 1,5 spasi.
- ✓ Seting halaman adalah 1 kolom sedangkan judul paling atas halaman untuk identitas penulis dibawah Judul.
- ✓ Ukuran kertas adalah A4 dengan lebar batas-batas tepi (margin) adalah 2,54 cm untuk batas atas, bawah dan kiri, kanan.

Judul Dan Nama Penulis

- ✓ Judul dicetak dengan huruf besar/kapital, dicetak tebal (bold) dengan jenis huruf Times New Roman font 12, spasi 1,5 dengan jumlah kata maksimum 20.
- ✓ Nama penulis ditulis di bawah judul tanpa gelar, tidak boleh disingkat, diawali dengan huruf kapital
- ✓ Tanpa diawali dengan kata"oleh", u penulis kedua, ketiga dan seterusnya.

Aturan Umum Penulisan Naskah

- ✓ Setiap sub judul ditulis dengan huruf Times New Roman font 12 dan dicetak tebal (bold).
- ✓ Alinea baru ditulis menjorok dengan indent-first line 1 cm, antar alinea tidak diberi spasi.
- ✓ Kata asing ditulis dengan huruf miring.
- ✓ Semua bilangan ditulis dengan angka, kecuali pada awal kalimat dan bilangan bulat yang kurang dari sepuluh harus dieja.
- ✓ Tabel dan gambar harus diberi keterangan yang jelas, dan diberi nomor urut

Referensi

Semua yang tertera dalam daftar pustaka harus dirujuk di dalam naskah. Kemutakhiran referensi sangat diutamakan.

• **Kerjasama dengan Instansi Pemerintah atau Swasta**

Kerjasama instansi pemerintah atau swasta merupakan kegiatan yang dilakukan antar instansi pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan bersama, dengan kerjasama akan lebih mudah untuk menyelesaikan kegiatan karena kita memiliki patner atau rekan untuk bertukar pikiran maupun penggunaan sarana/prasarana sehingga dapat berjalan dan terselesaikan dengan cepat dan dengan hasil yang maksimal. Bentuk Kerja Sama yang dilaksanakan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai PERMEN KP 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja KKP adalah Kesepakatan Bersama (KB), Nota Kesepahaman/Kesepakatan (NK), Memorandum Saling Pengertian (MSP) untuk Ormas Asing, Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama menerapkan prinsip-prinsip sesuai Permen KP No. 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut

- a. aman secara politis, keamanan, yuridis, dan teknis;
- b. mengutamakan kepentingan nasional;
- c. kejelasan tujuan dan hasil;
- d. kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
- e. saling menghargai dan menguntungkan;
- f. menjunjung asas musyawarah untuk mufakat;
- g. tidak menimbulkan ketergantungan;
- h. terencana dan berkelanjutan;
- i. dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- j. berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien; dan
- k. bersifat kelembagaan.

Pelaksanaan kegiatan kerjasama melalui proses sebagai berikut:

- ✓ Prinsip kesetaraan dapat dilakukan secara seremonial, sirkuler, maupun desk to desk
- ✓ Pembahasan Dokumen KB/NK/PKS dengan melibatkan Bagian Hukum dan Unit Kerja Terkait
- ✓ Pembahasan Dokumen KB/NK/PKS dengan melibatkan Bagian Hukum dan Unit Kerja Terkait

- ✓ Diajukan oleh mitra dan ditujukan kepada MKP, Esselon 1, ataupun Kepala Unit Kerja sesuai dengan kewenangannya

- **Kegiatan Promosi Khusus**

Kegiatan promosi merupakan bagian dari strategi komunikasi pemasaran Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) yang bertujuan untuk memperkenalkan, menginformasikan, membujuk, serta menjaga ingatan masyarakat terhadap produk dan layanan yang disediakan. Promosi dilaksanakan tidak hanya melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi yang luas dan cepat, tetapi juga melalui kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan kepercayaan publik terhadap peran dan layanan BRBIH. Melalui kegiatan promosi ini, BRBIH berupaya menginformasikan keberadaan produk dan layanan terbaru, membujuk serta mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang tersedia, dan menjaga keberlanjutan minat publik.

Selain itu, kegiatan promosi juga diarahkan untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui peningkatan transaksi layanan seperti layanan pemanfaatan lahan dan penjualan ikan, sekaligus membangun dan memperkuat citra positif BRBIH sebagai lembaga riset yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan public.

2. Layanan Umum

Anggaran pada output ini adalah sebesar Rp 3.665.000 (tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan output berupa 1 (satu) layanan untuk komponen berupa Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Riset Perikanan. Metode pengadaan barang pada kegiatan ini adalah swakelola yang mencakup belanja perjalanan dinas. Layanan ini mencakup pada pelaksanaan fungsi pengurusan ketatausahaan BRBIH yang dikelola oleh Bagian Tata Usaha BRBIH. Dalam kegiatan layanan umum ini dilaksanakan pengurusan rumah tangga, persuratan dan pengelolaan BMN berupa aktifitas menghimpun, mencatat, mengagendakan, mengelola dan menyimpan dokumen-dokumen yang dianggap penting dalam pengambilan keputusan dan menyusun kebijakan.

3. Layanan Perkantoran

Layanan ini terdiri atas 2 (dua) komponen dengan total anggaran Rp 7.941.766.000 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam

ribu rupiah) dengan output berupa 1 (satu) layanan. Tabel berikut ini menggambarkan besaran anggaran untuk masing-masing komponen.

Tabel 3. Daftar Komponen pada Output Layanan Perkantoran

No	Komponen	Anggaran (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan	4.559.977.000
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.381.789.000

Layanan perkantoran mengakomodir kebutuhan belanja pegawai dan belanja operasional dan pemeliharaan kantor. Uraian layanan pada RO ini dijelaskan sebagai berikut:

1) Gaji dan Tunjangan

Sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, setiap ASN (PNS dan PPPK) berhak mendapatkan gaji dan tunjangan sebagai bentuk perhatian dan penghargaan Pemerintah atas kinerja yang telah dilaksanakan. Pembayaran atas alokasi anggaran belanja pegawai selama 1 tahun meliputi gaji dan tunjangan yang dibayarkan setiap bulan, lembur, tunjangan hari raya (THR), gaji 13, uang makan dan tunjangan kinerja. Untuk komponen gaji terdiri atas gaji pokok, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan fungsional/ jabatan, tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) bagi PNS dan tunjangan beras.

2) Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Komponen operasional dan pemeliharaan kantor terdiri dari 4 (empat) sub komponen yaitu :

a. Kebutuhan sehari-hari perkantoran

Anggaran kebutuhan sehari-hari perkantoran dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan belanja keperluan perkantoran diantaranya berupa air minum pegawai, honor dan iuran BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang dibayarkan setiap bulan dan tunjangan hari raya (THR), belanja biaya tol pimpinan, belanja bahan berupa konsumsi, belanja barang persediaan berupa pakan, alat dan bahan bantu operasional produksi, alat dan bahan bantu media digital, belanja jasa lainnya berupa pembayaran honor dan iuran BPJS Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP), Upah Harian Lepas (UHL) dan jasa pemandu senam.

b. Langganan daya dan jasa

Langganan daya dan jasa mencakup pembayaran setiap bulan atas tagihan listrik, telepon, internet, google drive, lisensi rapat daring, aplikasi, domain dan server.

c. Pemeliharaan kantor

Pemeliharaan kantor dilaksanakan dengan kegiatan berupa pemeliharaan gedung dan bangunan yang pengadaannya dilakukan secara kontraktual, pemeliharaan peralatan dan mesin, serta pemeliharaan jaringan internet yang dilakukan secara swakelola.

d. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor

Untuk pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor dilakukan pembayaran atas honor operasional satuan kerja mencakup honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengelola PNBPN dan honorarium pengurus/ penyimpan barang milik negara.

4. Layanan Manajemen SDM Internal

Layanan manajemen SDM Internal dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan output berupa 1 (satu) layanan. Komponen pada layanan ini berupa Pelayanan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Riset Perikanan. Anggaran yang tersedia pada layanan ini mengakomodir kebutuhan belanja barang persediaan berupa ATK dan Bahan Komputer dengan berupa metode pengadaan secara swakelola.

Layanan manajemen SDM dikelola oleh Bagian Kepegawaian dibawah Koordinasi Tata Usaha. Manajemen SDM merupakan bagian yang penting dalam sebuah organisasi termasuk BRBIH. Dengan anggaran yang tersedia kegiatan manajemen SDM diupayakan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam mendukung penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, mutasi, manajemen kinerja, penghargaan, disiplin, pelayanan serta sistem informasi kepegawaian. Berikut uraian kegiatan layanan manajemen SDM yang dilakukan pada tahun 2025:

- Pendataan ASN maupun non ASN yang akan diproses administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan manajemen ASN.
- Pengumpulan berkas dan dokumen yang diperlukan pada setiap proses administrasi kepegawaian;

- Memverifikasi dan memvalidasi administrasi kepegawaian yang telah sesuai;
- Memproses semua kegiatan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku;
- Menerapkan pelaksanaan pelayanan kepegawaian berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Anggaran pada layanan ini adalah sebesar Rp 5.895.000 (lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan output berupa 1 (satu) dokumen untuk komponen berupa Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Riset Perikanan. Metode pengadaan yang digunakan untuk kegiatan belanja pada layanan ini adalah dengan swakelola.

Layanan perencanaan dan penganggaran dikelola oleh Bagian Tata Operasional BRBIH. Layanan ini mengakomodir penyelenggaraan fungsi BRBIH dalam penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang riset budidaya ikan hias. Namun sebagaimana 3 (tiga) tahun sebelumnya, di tahun 2025 BRBIH sudah tidak memiliki program dan anggaran terkait dengan riset.

Penyusunan rencana anggaran BRBIH mengacu kepada program dan kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) selaku Unit Eselon I dan Sekretariat BPPSDM selaku Unit Eselon II. Dalam melakukan penyusunan rencana anggaran tahun mendatang dan revisi anggaran tahun berjalan, BRBIH melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Unit Eselon I, Eselon II, dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Bandung. Revisi anggaran tahun berjalan dilaksanakan dalam rangka penyesuaian pemenuhan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023.

Dalam kegiatan perencanaan, selain terkait penyusunan anggaran, disusun dokumen kinerja berupa Perjanjian Kinerja (PK) BRBIH yang mengacu pada Renja KKP dan Renstra BPPSDM, manual Indikator Kinerja Utama (IKU) dan rencana aksi.

Dalam kegiatan penyusunan rencana dan anggaran kegiatan, dipergunakan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang terkoneksi dengan aplikasi pelaporan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN)

dan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

6. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Pada layanan pemantauan dan evaluasi dialokasikan anggaran sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan komponen berupa Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Riset Perikanan. Output layanan ini adalah 1 (satu) dokumen. Metode pengadaan barang yang digunakan untuk menunjang belanja pada layanan ini adalah swakelola.

Dalam melaksanakan kegiatan layanan pemantauan dan evaluasi, BRBIH mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengukur dan menilai perkembangan atau capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh BRBIH, mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan dan upaya penyelesaian masalah yang akan/ telah dilakukan, menjaga proses kerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan, menilai pelaksanaan pengendalian risiko atas program dan kegiatan yang dijalankan oleh pelaksana program dan kegiatan dan mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya dan penyalahgunaan jabatan atau wewenang dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan BRBIH yang mengacu kepada Renstra dan Renja yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi tersebut meliputi:

- a. Realisasi keuangan dan fisik;
- b. Pengendalian risiko;
- c. Pencapaian hasil;
- d. Kendala yang dihadapi; dan
- e. Langkah perbaikan.

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi, dilakukan pertemuan pimpinan dengan penanggung jawab kegiatan. Pertemuan ini dilakukan secara berkala yaitu mingguan dan bulanan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, membahas permasalahan serta tindaklanjut penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi. Pembahasan tidak hanya terbatas pada realisasi keuangan dan fisik, namun juga terkait dengan pencapaian atas target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan disusun dalam laporan mingguan, laporan bulanan, laporan tahunan dan laporan kinerja.

Pada layanan pemantauan dan evaluasi juga dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Atas pelaksanaan SAKIP, setiap instansi pemerintah harus melakukan evaluasi setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pada Triwulan ke II Tahun 2025, BRBIH melakukan penilaian mandiri SAKIP berdasarkan kinerja triwulan II s.d IV Tahun 2024 dan kinerja triwulan I Tahun 2025. Penilaian mandiri ini didasarkan kepada dokumen kinerja yang mencakup dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal. Atas hasil penilaian mandiri ini selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim Evaluasi SAKIP BPPSDM.

7. Layanan Manajemen Keuangan

Output layanan ini adalah 1 (satu) dokumen dengan Pelayanan Keuangan Riset Perikanan yang merupakan komponen output layanan ini. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan layanan ini adalah sebesar Rp 3.290.000 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Metode pengadaan barang pada layanan ini dilakukan secara swakelola untuk memenuhi kebutuhan ATK dan bahan komputer guna menunjang kegiatan layanan.

Layanan manajemen keuangan merujuk pada pengelolaan atas fungsi-fungsi keuangan yang meliputi pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencairan dan penyimpanan dana BRBIH. Pada Satker BRBIH, kegiatan pengelolaan administrasi keuangan meliputi sistem akuntansi pada tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pada Unit Akuntansi tingkat KPA, BRBIH wajib menyusun laporan keuangan berupa

laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, selain melakukan kegiatan pengelolaan keuangan, BRBIH juga melakukan rekonsiliasi, koordinasi, konsultasi internal dengan Biro Keuangan KKP dan Bagian Keuangan BPPSDM serta eksternal dengan KPPN Bogor.

BAB III HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

• Pelayanan Publik

Tujuan pelayanan publik adalah untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta harapan masyarakat sebagai pengguna layanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan jenis pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, yaitu pelayanan yang mampu menjembatani kesesuaian antara harapan dan kenyataan yang diterima. Pelayanan yang baik akan membangun kesan positif serta citra yang baik di mata masyarakat, sehingga mendorong dan memotivasi pelanggan untuk bekerja sama dan berperan aktif dalam pelaksanaan pelayanan prima. Oleh karena itu, pelaksanaan jenis pelayanan publik harus dilakukan secara optimal dan dipantau secara berkelanjutan agar penerapannya berjalan dengan baik, sejalan dengan upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi dan good governance (pemerintahan yang baik). Kegiatan pelayanan publik selama Tahun 2025 BRBIH, melaksanakan pelayanan publik diantaranya :

a. Pelayanan Pemanfaatan Aset

Sepanjang tahun 2025 kegiatan sewa yang tercatat meliputi sewa lapangan bola sebanyak 10 kali, yang seluruhnya dilakukan pada bulan Januari. Selain itu, terdapat sewa tanah sebanyak 1 unit, sewa aula sebanyak 1 unit, sewa kolam sebanyak 15 unit, sewa bangunan semi permanen sebanyak 1 unit, serta sewa sebagian tanah untuk keperluan ATM sebanyak 1 unit. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan variasi jenis aset yang disewakan dengan frekuensi dan satuan yang berbeda sesuai kebutuhan pengguna. Berikut tabel yang menggambarkan kegiatan sewa aset BRBIH di tahun 2025:

Tabel 4 Kegiatan Sewa Aset BRBIH Tahun 2025

No	Tanggal	Penyewa	Uraian	Jumlah	Satuan
1	6 Januari 2025	Chasbi DPR RI	Sewa lapangan bola	1	kali
2	7 Januari 2025	Ari Kuttab Beji	Sewa lapangan bola	1	kali
3	7 Januari 2025	Chasbi Chusna	Sewa lapangan bola	1	kali
4	7 Januari 2025	Yulis SSB Setia Junior	Sewa lapangan bola	3	kali
5	13 Januari 2025	H. Eko Persaudaraan Haji	Sewa lapangan bola	1	kali
6	13 Januari 2025	Ilham MBR Jr FC	Sewa lapangan	1	kali

			bola		
7	13 Januari 2025	Puma Rasel FC	Sewa lapangan bola	1	kali
8	14 Januari 2025	Gandor	Sewa lapangan bola	1	kali
9	28 April 2025	PT Prama	Sewa tanah	1	unit
10	7 Mei 2025	Koperasi	Sewa aula	1	unit
11	20 Juni 2025	Kalikan	Sewa kolam	15	unit
12	28 Agustus 2025	PT Jelajah Inovasi	Sewa bangunan semi permanen	1	unit
13	29 Agustus 2025	BNI Tbk.	Sewa sebagian tanah untuk ATM	1	unit

b. Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis

➤ **Konsultasi dan Bimbingan Teknis dengan Program Webinar/ Workshop baik yang diselenggarakan oleh BRBIH maupun BRBIH selaku Narasumber**

Selama tahun 2025, BRBIH menyelenggarakan serta berpartisipasi sebagai narasumber undangan dalam 30 kegiatan pelatihan yang diikuti oleh 3.693 peserta. Kegiatan pelatihan tersebut mencakup berbagai topik, antara lain teknologi budidaya ikan hias, pakan, serta bidang lain yang relevan. Pelaksanaan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mendukung pengembangan sektor perikanan. Data pelaksanaan workshop/ webinar selama tahun 2025 tersaji sebagai berikut.

Tabel 5 Workshop/ Webinar Tahun 2025

No	Tanggal	Kegiatan/ Penyelenggara	Peserta	Tempat	Materi	Narasumber	Jumlah Peserta
1	07 Januari 2025	Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH)	Para Mahasiswa dari Berbagai Perguruan Tinggi	BRBIH	Inovasi Pakan Ramah Lingkungan	Dr. Melta Rini Fahmi	64
2	08 Januari 2025	Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH)	Para Mahasiswa dari Berbagai Perguruan Tinggi	BRBIH	Mengenal Potensi Bisnis Pakan Alami	Rangga Wiryawan, S. Pi	63
3	15 Januari 2025	Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH)	Para Mahasiswa dari Berbagai Perguruan Tinggi	BRBIH	Workshop Pemijahan Ikan Koi Semi Buatan	Dr. Nina Meilisza	75
4	15 Januari 2025	Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH)	Para warga sekitar dan Dharma Wanita Persatuan BRBIH	BRBIH	Workshop mengenai pemilahan dan pengumpulan Sisa Organik Makanan (SOM)	Dr. Joni Haryadi, M.Sc dan Dr. Melta Rini Fahmi	50

5	21 Januari 2025	Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH)	Para Mahasiswa dari Berbagai Perguruan Tinggi	BRBIH	Workshop Budidaya Ikan Mas Koki	Dr. Nina Meilisza	45
6	31 Januari 2025	Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH)	Mahasiswa Politeknik AUP Sidoarjo	BRBIH	Pengelolaan limbah dalam dunia akuakultur	Dr. Joni Haryadi, M.Sc	12
7	10 Februari 2025	Balai Riset Budidaya Ikan Hias	Para Mahasiswa dari Berbagai Perguruan Tinggi	BRBIH	Pembuatan Low Carbon Feed	Dr. Melta Rini Fahmi	23
8	20 Februari 2025	Poltek AUP Pasar Minggu	Para Mahasiswa Politeknik AUP	Kampus Pasar Minggu, Jakarta	Kualitas Air Akuakultur	Dr. Joni Haryadi, M.Sc	50
9	26 Februari 2025	Poltek AUP Pasar Minggu	Para Mahasiswa Politeknik AUP	BRBIH	- Teknik penyiapan kualitas air - Karakteristik budidaya air payau, serta - Pengendalian bahan organik	Dr. Joni Haryadi, M.Sc	50
10	17 Juni 2025	Webinar Aquascape / BRBIH	pembudidaya, penyuluh, akademisi, perwakilan dinas, pelaku swasta, hingga masyarakat umum.	Zoom dan Live Youtube	Punya Akuarium Biasa Sulap Jadi Aquascape & Menghasilkan Cuan	Bayu, ST	72
11	08 Juli 2025	Workshop / BRBIH	Mahasiswa magang dari seluruh Indonesia	BRBIH	Mengenal Warna pada Ikan Hias	Dr. Nina Meilisza	50
12	15 Juli 2025	Workshop / BRBIH	Mahasiswa magang dari seluruh Indonesia (15 Universitas)	BRBIH	Peluang Usaha Ikan Hias untuk Indonesia Maju & Budidaya Magot sebagai Pakan Ikan dan Solusi Pengurai Sampah Organik	Dr. Joni Haryadi & Dr. Melta Rini	77
13	22 Juli 2025	Webinar / BRBIH	pembudidaya, penyuluh, komunitas, akademisi, perwakilan dinas, pelaku usaha swasta, hingga masyarakat	BRBIH	Kunci Sukses Budidaya Arwana	Rina Hirnawati, S.PI, M.Si	250
14	31 Juli 2025	Webinar / BRBIH	Mahasiswa magang dari seluruh Indonesia (15 Universitas)	BRBIH	webinar aquasca	Bayu, ST	77

15	21-23 Agustus 2025	Program Kampung Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEU) Berbasis KUA Tahun 2025 / Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf – Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama RI	Kementerian Agama	Kementerian Agama	terkait strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang efektif dan kolaboratif	Dr. Joni Haryadi	20
16	26 Agustus 2025	Webinar Budidaya Ikan Hias / BRBIH	pembudidaya, penyuluh, komunitas, akademisi, perwakilan dinas, pelaku usaha swasta, masyarakat umum	Zoom dan YouTube	webinar bertajuk “Jadi Ahli Budidaya Ikan Koi, Mudah Kok”	Dr. Nina Meilisza	375
17	29 Agustus 2025	Fasilitasi Difusi Inovasi dan Teknologi Kabupaten Bekasi / Badan Penelitian & Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kab. Bekasi	Pembudidaya Penyuluh	Bekasi	pentingnya penerapan hasil riset dan teknologi dalam mendukung produktivitas, kualitas, serta daya saing ikan hias Indonesia	Dr. Joni Haryadi, M.Sc dan Dr. Nina Meilisza	16
18	8-9 September 2025	Transfer Teknologi kepada BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta / BRBIH dan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta	BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta	BRBIH	Transfer teknologi inovasi pakan ramah lingkungan, kegiatan ini berfokus pada pemanfaatan larva Black Soldier Fly (BSF)	Dr. Melta Rini Fahmi	15
19	25 September – 2 Oktober 2025	Transfer Teknologi Guru SMK Negeri / BBPPMPV Pertanian dan BRBIH	Guru Vokasi seluruh Indonesia	BRBIH	Budidaya Ikan Koi, Budidaya Ikan Awrana, Budidaya Tiger Barb dan Aquascape	Dr. Melta Rini Fahmi, Dr. Nina Meilisza, Rina Hirnawati, M.Si, Bayu, ST	12
20	30-Sep-25	Workshop Low Carbon Feed	Penyuluh, instansi dinas, pemerintah daerah, hingga masyarakat umum	BRBIH	Workshop Low Carbon Feed: Jawaban Pakan Berkualitas, Ramah Lingkungan	Dr. Melta Rini Fahmi	539
21	08 Oktober 2025	Webinar Intani Talk Edisi 178 / Komunitas Insan Tani dan Nelayan Indonesia (Intani)	Masyarakat, Komunitas Tani dan Nelayan	Zoom dan Live Youtube	LoCa: Solusi Pakan Masa Depan Ramah Lingkungan.	Dr. Melta Rini Fahmi	128

22	17 Oktober 2025	Pelatihan Budidaya Perikanan / Pemda Jakarta Timur	Kelompok pembudidaya ikan darat.	Ruang Pertemuan Gedung Pusat Promosi Sertifikasi Hasil Pertanian, Klender, Duren Sawit Jakarta Timur	Transformasi Digital Budidaya Ikan Hias sebagai Inovasi Manajemen berkelanjutan	Dr. Melta Rini Fahmi	60
23	20 Oktober 2025	Pelatihan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan / (DKPPP) Pemerintah Kota Bekasi	Pegawai penyuluh perikanan Pemerintah Kota Bekasi, pelaku usaha, serta kelompok pembudidaya ikan.	Rapat DKPPP, Jl. Jend. A. Yani, Kota Bekasi	(1) Kesehatan Ikan dan Penanganan Penyakit (2) Manajemen Usaha dan Pemasaran (3) Inovasi Teknologi Budidaya (4) Pakan Ikan	drh. Tatik Mufidah dan Dr. Nina Meilisza	20
24	28 Oktober 2025	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) dan BRBIH	Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA)	BRBIH	Pengelolaan limbah organik menggunakan larva BSF sebagai solusi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Para peserta mendapatkan materi teori dan praktik langsung, mulai dari proses budidaya larva hingga pemanfaatannya sebagai pakan dan kompos.	Dr. Melta Rini Fahmi	5
25	11-Nov-25	Webinar Workshop BRBIH / BRBIH	ASN, PPPK, Pemda, Penyuluh Perikanan, Pembudidaya, Sektor Swasta, Mahasiswa, serta Siswa	Zoom dan Live Youtube	Rahasia di Balik Jantansi Ikan untuk Hasil Maksimal	Dr. Shofihar Sinansari, MP	463
26	22-23 November 2025	Program Palugada	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Kerapu	Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Usaha Budidaya Larva Black Soldier Fly (BSF)	Dr. Melta Rini Fahmi	15

27	28-Nov-25	BRBIH dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung	BRBIH	Potensi dan Teknologi Budidaya Ikan Hias	Dr. Nina Meilisza	20
28	10 Desember 2025	PROAKSI (Perkumpulan Profesi Akuakultur Indonesia)	Profesi Akuakultur dari seluruh Indonesia	Zoom Meeting	Inovasi Produksi Pakan Alami Perikanan Budidaya	Dr. Melta Rini Fahmi	575
29	16 Desember 2025	Webinar / BRBIH	Peserta berasal dari berbagai kalangan instansi pemerintah, swasta, akademisi, pembudidaya, hingga masyarakat umum dari seluruh Indonesia	Zoom Meeting dan Live Youtube	Webinar "Ikan Sehat, Cuan Selamat"	Dr. drh. Tatik Mufidah, M.Biomed	460
30	10 Desember 2025	BRBIH	Dosen dan Mahasiswa Universitas Satya Negara Indonesia	BRBIH	Praktikum Mata Kuliah Teknologi dan Sistem Akuakultur	Dr. Nina Meilisza	12
TOTAL							3,693

➤ **Konsultasi dan Bimbingan Teknis dengan Program Magang / PKL dan Penelitian (Surat Keterangan dan Sertifikat)**

Layanan konsultasi dan bimbingan teknis melalui program permagangan, BRBIH menerima 266 siswa dan mahasiswa dari berbagai lembaga pendidikan, baik SMK maupun perguruan tinggi, sepanjang tahun 2025. Peserta magang tersebut mengikuti pembelajaran dan praktik berbagai keahlian, antara lain budidaya ikan hias, aquascape, pakan, serta bidang terkait lainnya. Berikut data Perguruan Tinggi dan Jumlah Peserta yang telah mengikuti program magang di BRBIH pada tahun 2025.

Tabel 6 Data Program Magang Tahun 2025

No	Perguruan Tinggi / Sekolah	Jumlah Peserta
1	Institut Teknologi Bandung	1
2	IPB University	37
3	Politeknik Ahli Usaha Perikanan	33
4	Politeknik Negeri Media Kreatif	1
5	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2
6	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	2
7	Universitas Airlangga	1
8	Universitas Bangka Belitung	4

9	Universitas Bina Sarana Informatika	9
10	Universitas Brawijaya	36
11	Universitas Diponegoro	7
12	Universitas Indraprasta PGRI	2
13	Universitas Jenderal Soedirman	6
14	Universitas Lampung	3
15	Universitas Muhammadiyah Malang	4
16	Universitas Negeri Jakarta	11
17	Universitas Padjajaran	11
18	Universitas Pakuan	6
19	Universitas Pendidikan Indonesia	8
20	Universitas Riau	4
21	Universitas Sriwijaya	11
22	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	20
23	Universitas Tidar	3
24	SMK Arjuna	8
25	SMK Citra Negara	7
26	SMK Dwiguna	2
27	SMK PRISMA	5
28	SMKN 3 Depok	4
29	SMKN 36 Jakarta	18
	Total	266

➤ **Konsultasi dan Pengenalan Ikan Hias dan Pakan dengan Program Kunjungan dan Eduwisata**

BRBIH juga memberikan layanan konsultasi serta pengenalan ikan hias yang dikemas dalam bentuk kunjungan langsung ke BRBIH, meliputi peninjauan sarana dan prasarana serta kegiatan eduwisata. Sepanjang periode pelaksanaan, layanan ini diikuti oleh 73 instansi dari berbagai daerah yang terdiri atas instansi pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan, dengan jumlah peserta sekitar 4.768 orang.

Tabel 7 Jumlah Peserta Kunjungan Tahun 2025

Bulan	Jumlah Peserta
Januari	161
Februari	229
Maret	20
April	70
Mei	241
Juni	7
Juli	72

Agustus	2.274
September	582
Oktober	563
November	450
Desember	99
Total	4.768

Untuk mendukung setiap kegiatan layanan, petugas pelayanan senantiasa didorong dan dimotivasi agar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Bentuk motivasi dapat berupa pengakuan dan apresiasi atas kinerja yang telah diberikan secara maksimal. Di sisi lain, petugas pelayanan juga perlu mendapatkan pembinaan apabila melakukan pelanggaran kode etik pelayanan. Pembinaan tersebut diutamakan bersifat edukatif agar pelanggaran yang sama tidak terulang di masa mendatang. Apabila pelanggaran tergolong berat, dapat diberikan sanksi yang bersifat tegas sebagai bentuk efek jera, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, terdapat beberapa faktor utama yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. **Kualitas pelayanan**, dengan menerapkan budaya kerja BRBIH yaitu **6S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun, dan Safety)**, menghormati hak masyarakat, serta menyediakan fasilitas yang memadai, termasuk bagi penyandang disabilitas.
2. **Profesionalisme aparatur**, yaitu memiliki kompetensi sesuai bidang tugas, menjunjung tinggi integritas, serta menerapkan nilai anti-korupsi dalam setiap pelaksanaan pelayanan.
3. **Kepuasan masyarakat**, melalui pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dan pemanfaatan hasil survei tersebut sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan.
4. **Pemanfaatan teknologi informasi**, dengan mengembangkan layanan berbasis daring untuk mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan aksesibilitas melalui aplikasi atau situs web.
5. **Pengelolaan pengaduan**, dengan menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses, seperti call center atau platform online, serta memastikan setiap pengaduan ditangani secara cepat, transparan, dan adil.
6. **Evaluasi dan rekomendasi**, yang dilakukan berdasarkan analisis kinerja dengan membandingkan capaian terhadap target atau standar yang telah ditetapkan, serta memperhatikan tantangan dan kendala pelayanan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, maupun infrastruktur.

Melalui penerapan faktor-faktor tersebut, diharapkan kualitas pelayanan publik di BRBIH dapat terus meningkat dan memberikan kepuasan yang optimal kepada masyarakat.

- **Pengaduan**

Balai Riset Budidaya Ikan Hias telah melakukan tindak lanjut terhadap penanganan pengaduan masyarakat secara berkala. Selama kurun waktu bulan Januari s/d Desember 2025. Adapun Hasil Laporan Pengaduan Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 8 Jumlah Pengaduan di Tahun 2025

Bulan	Jumlah Pengaduan
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	1
Juni	1
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Total	2

- **Gratifikasi**

Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Gratifikasi Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Tahun 2025 disusun sebagai bentuk komitmen institusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Kegiatan pengendalian gratifikasi dilaksanakan selama periode Januari hingga Desember 2025 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta arahan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sepanjang tahun 2025, BRBIH secara konsisten melaksanakan berbagai upaya pengendalian gratifikasi melalui sosialisasi, kampanye publik, pembentukan dan penguatan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), serta pendataan dan pelaporan gratifikasi secara berkala. Sosialisasi dilakukan baik secara langsung kepada pegawai dan pemangku kepentingan maupun melalui media internal, media sosial, banner, poster, dan surat-menyurat layanan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran anti gratifikasi.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, tercatat sebanyak tiga laporan gratifikasi yang seluruhnya telah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai ketentuan. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan dan kesadaran pegawai BRBIH yang baik dalam melaksanakan kewajiban pelaporan serta menolak setiap bentuk pemberian

yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Pemberian yang tidak dapat ditolak telah dikelola sesuai prosedur dan dilaporkan secara transparan.

Secara umum, pelaksanaan pengendalian gratifikasi di BRBIH berjalan dengan baik dan efektif. Ke depan, BRBIH berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengendalian gratifikasi melalui peningkatan sosialisasi, evaluasi berkelanjutan, serta optimalisasi peran Unit Pengendali Gratifikasi guna mendukung pelayanan publik yang bersih, profesional, dan berintegritas.

Selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025, BRBIH menerima 3 laporan yaitu sebagai berikut :

Tabel 9 Pelaporan Gratifikasi ke KPK

No	Tanggal	Nama Pelapor	Bagian	Uraian Laporan Gratifikasi	Nilai Taksiran (Rp)	No. Gratifikasi dan Status dari KPK	Status Laporan ke KPK sudah/ Belum	Tanggal Laporan ke KPK
1	27 Desember 2024	Fitri Rahmawati	Pelayanan Teknis	Melaporkan Pemberian Gratifikasi berupa Smart Cup / Tumbler	50.000	G013-202501-013021-BIG-002/ Status : Dikelola oleh Instansi	Sudah	02 Januari 2025
2	12 November 2025	Fitri Rahmawati	Pelayanan Teknis	Melaporkan Pemberian Gratifikasi berupa Kue Bunga Bakery dari masyarakat yang melakukan kunjungan	81.000	G013-202511-017333-BIG-001/ Status : Pasal 6 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi	Sudah	13 November 2025
3	31 Desember 2025	Fitri Rahmawati	Pelayanan Teknis	Melaporkan Pemberian Gratifikasi berupa Kue Bunga Bakery dari masyarakat yang melakukan PKL/Magang	81.000	G013-202601-018134-BIG/ Status : Pasal 6 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi	Sudah	02 Januari 2026

• Survey Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi SUSAN, dapat diinformasikan bahwa kinerja layanan BRBIH pada produk layanan bimbingan teknis/ konsultasi dan pemanfaatan lahan termasuk dalam kategori baik dan sangat baik. Hal ini berarti BRBIH telah memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, namun review atas kegiatan pelayanan ini tetap perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Berikut ini tabel nilai SKM BRBIH selama tahun 2025.

Tabel 10 Nilai SKM Tahun 2025

Triwulan	Produk Layanan	Nilai SKM	Mutu Pelayanan	Makna
I	Bimbingan Teknis/ Konsultasi	89,94	A	Sangat Baik
II	Bimbingan Teknis/ Konsultasi	88,22	B	Baik
III	Pemanfaatan Lahan	86,2	B	Baik
	Bimbingan Teknis/ Konsultasi	87,87	B	Baik
IV	Pemanfaatan Lahan	86,96	B	Baik
	Bimbingan Teknis/ Konsultasi	88,83	A	Sangat Baik

- **Survey Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)**

- a. IPKP didasarkan pada hasil survey yang dilakukan atas unsur-unsur pelayanan yang menjadi indikator penilaian. Berdasarkan hasil survey IPKP yang dilakukan, berikut nilai masing-masing unsur pelayanan berdasarkan hasil survey di tahun 2025.

Tabel 11 Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Mutu	Kinerja Unit Pelayanan
1	Persyaratan Pelayanan	3,83	A	Sangat Baik
2	Prosedur Pelayanan	3,84	A	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,88	A	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3,85	A	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis	3,82	A	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana atau	3,90	A	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,87	A	Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,87	A	Sangat Baik
Rata-rata		3,85	A	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, nilai rata-rata dari unsur layanan pada survey IPKP adalah 3,85 yang menunjukkan kriteria kinerja unit pelayanan Sangat Baik dengan nilai A sebagaimana tabel kriteria kinerja unit pelayanan berikut.

Tabel 12 Nilai Interval dan Kriteria IPKP

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00–2,5996	25,00–64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan tabel 11 diatas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Persyaratan pelayanan di BRBIH mudah dipahami;
2. Kemudahan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan di BRBIH;
3. BRBIH mengutamakan ketepatan waktu penyelesaian dalam memberikan pelayanan;
4. BRBIH memberikan kejelasan informasi terkait biaya/tarif dalam pelayanan;
5. BRBIH menyajikan produk/jasa spesifikasi jenis pelayanan memenuhi ketepatan mutu pelayanan yang dijanjikan;

6. Petugas pelayanan BRBIH kompeten dalam memberikan pelayanan;
7. Petugas pelaksana dalam pelayanan di BRBIH bersikap sopan dan ramah;
8. Fasilitas penanganan pengaduan, saran dan masukan pengguna layanan BRBIH sudah dikelola dengan baik.

b. Hasil Kegiatan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat di BRBIH tahun 2025 dilakukan untuk mengetahui apakah pelayanan yang diterapkan berpeluang menimbulkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) atau tidak. Adapun unsur yang dinilai meliputi prosedur dan sikap petugas terhadap para pengguna layanan yang mengajukan perizinan serta terdapat pertanyaan mengenai tindak lanjut pengaduan yang pernah dilakukan oleh pengguna layanan. Berdasarkan hasil Survei yang telah dilakukan maka diperoleh nilai sebagai berikut.

- 1) Prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Pertanyaan ini memperoleh nilai 4,00 artinya pengguna jasa setuju bahwa prosedur telah memadai dan tidak berpotensi untuk KKN.
- 2) Petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan diluar prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan uang/barang.
Pertanyaan ini memperoleh 4,00 artinya pengguna jasa setuju bahwa tidak ada layanan diluar prosedur yang mengharuskan pemberian uang imbalan.
- 3) Tidak terdapat praktek percaloan/perantara yang tidak resmi.
Pertanyaan ini memperoleh nilai 4,00 artinya pengguna jasa setuju bahwa tidak ada praktek percaloan yang dilakukan.
- 4) Petugas pelayanan tidak diskriminatif.
Pertanyaan ini memperoleh nilai 4,00 artinya pengguna jasa setuju bahwa tidak ada pelayanan yang diskriminatif.
- 5) Tidak terdapat pungutan liar.
Pertanyaan ini memperoleh nilai 4,00 artinya pengguna jasa setuju bahwa BRBIH tidak terdapat pungutan liar.
- 6) Petugas pelayanan tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan yang diberikan.
Pertanyaan ini memperoleh nilai 4,00 artinya pengguna jasa setuju bahwa tidak ada petugas yang meminta imbalan terkait pelayanan yang diberikan.
- 7) Petugas pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan. Pertanyaan ini memperoleh nilai 4,00 artinya pengguna jasa setuju bahwa petugas menolak pemberian uang/barang yang diberikan terkait dengan layanan yang diterimanya.

8) Tidak ada pengaduan tentang tindak pidana korupsi sehingga tidak ada tindak lanjut dalam penanganan pengaduan.

9) Produk/Jasa Layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/jasa layanan yang tersedia. Pertanyaan ini memperoleh nilai 4,00 artinya pengguna jasa setuju bahwa petugas hanya memberikan produk/jasa layanan sesuai dengan daftar produk/jasa layanan yang tersedia.

Dari seluruh penilaian yang dilakukan, diperoleh nilai rata-rata 4,00 dengan Mutu Pelayanan A dan Kinerja Sangat Baik. Berikut tabel hasil penilaian setiap ruang lingkupnya.

Tabel 13 Rata-rata skor peringkat pada setiap ruang lingkup pengukuran IPAK

No	Ruang lingkup	Nilai Rata-	Kategori	Peringkat
1	Prosedur yang tidak menimbulkan KKN	4,00	Sangat Baik	A
2	Petugas tidak memberikan pelayanan diluar prosedur	4,00	Sangat Baik	A
3	Tidak ada pencaloan	4,00	Sangat Baik	A
4	Petugas tidak diskriminatif	4,00	Sangat Baik	A
5	Tidak ada pungutan liar	4,00	Sangat Baik	A
6	Petugas tidak meminta imbalan atas layanan yang diberikan	4,00	Sangat Baik	A
7	Petugas menolak pemberian uang/barang	4,00	Sangat Baik	A
8	Tidak ada diskriminasi dalam penanganan pengaduan.	4,00	Sangat Baik	A
9	Produk/Jasa Layanan yang diterima sesuai dengan daftar	4,00	Sangat Baik	A

Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat di BRBIH akhir Tahun 2025 dapat diinformasikan sebagai berikut:

1) Jumlah responden dalam Survei Kepuasan Masyarakat di BRBIH sebanyak 65 (enam puluh lima) orang dengan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin jumlah laki-laki sebanyak 43% dan perempuan 57% dengan latar belakang pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 71%, D4/S1 sebanyak 29% dan berprofesi sebagai Pelajar/Mahasiswa sebanyak 100%.

- 2) Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) di BRBIH adalah 3,85 dengan Nilai IPKP setelah dikonversi mendapatkan nilai 96,43 dan Mutu Pelayanan termasuk kategori A dengan hasil Kinerja unit pelayanan adalah Sangat Baik; dan
- 3) Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di BRBIH adalah 4,00 dengan Nilai IPAK setelah dikonversi mendapatkan nilai 100 dan termasuk kategori A dengan hasil Kinerja unit pelayanan adalah “Sangat Baik” dan yang menyatakan bahwa pengguna jasa setuju atas sikap anti korupsi yang dimiliki petugas (sikap tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan dan pelayanan yang tidak berpotensi menimbulkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)).

- **Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi**

Berdasarkan tabel rekapitulasi, selama tahun 2025 Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) telah menerima 470 permohonan informasi publik yang seluruhnya tercatat sebagai data permohonan. Dari jumlah tersebut, 440 permohonan ($\pm 94\%$) dinyatakan diterima, sedangkan 30 permohonan ($\pm 6\%$) ditolak, tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon.

Alasan penolakan disebabkan beberapa faktor. Berikut ini alasan penolakan permohonan yang diajukan selama Tahun 2025:

- 1) Keterbatasan kuota magang, baik pada bidang yang diminati maupun periode waktu tertentu.
- 2) Keterbatasan jadwal kegiatan, seperti jadwal kunjungan, eduwisata, dan pelatihan
- 3) Ketersediaan kegiatan, sarana, atau komoditas yang diminta, antara lain tidak adanya kegiatan penelitian atau riset, fasilitas laboratorium, bahan serta komoditas ikan berdasarkan ukuran yang sesuai dengan sesuai permintaan pemohon.
- 4) Ketidaktersediaan lowongan pekerjaan
- 5) Permohonan tidak termasuk dalam kewenangan BRBIH, seperti pemberian bantuan atau pengujian tertentu di luar tupoksi.
- 6) Penolakan yang bersifat administratif dan informatif, misalnya terkait ketentuan webinar yang mewajibkan pengisian absensi untuk memperoleh sertifikat, serta permohonan dokumen atau panduan khusus yang belum tersedia karena bersifat internal.

Secara keseluruhan, penolakan permohonan telah dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan kondisi riil serta ketentuan yang berlaku, sehingga tetap mencerminkan akuntabilitas dan profesionalisme pelayanan publik di BRBIH selama Tahun 2025.

Aktivitas akses informasi dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu secara langsung sebanyak 213 permohonan dan secara online sebanyak 257 permohonan, yang menunjukkan bahwa kanal layanan digital lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dibandingkan layanan tatap muka.

Jika dilihat data perbulan selama tahun 2025, jumlah data pemohon terbanyak terjadi pada bulan November 2025, yaitu sebanyak 81 orang. Berikut ini tabel rekapitulasi permintaan data dan informasi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Tabel 14 Rekapitulasi Permintaan data dan informasi di Tahun 2025

NO	BULAN	JUMLAH DATA	ALASAN DITOLAK	JUMLAH KEBERATAN	JUMLAH PEMOHON (ORANG)	JUMLAH DATA	DITERIMA (DATA)	DITOLAK (DATA)	WAKTU PENYELESAIAN (HARI)	MELIHAT/ MEMBACA/ MENDENGARKAN/ MENCATAT	SECARA LANGSUNG	ONLINE
1	JANUARI	25	0	0	25	25	25	0	1	25	17	8
2	FEBRUARI	45	6	0	45	45	39	6	1	45	25	20
3	MARET	11	1	0	11	11	10	1	1	11	3	8
4	APRIL	25	4	0	25	25	21	4	1	25	6	19
5	MEI	19	0	0	19	19	19	0	1	19	12	7
6	JUNI	34	1	0	34	34	33	1	1	34	14	20
7	JULI	40	1	0	40	40	39	1	1	40	26	14
8	AGUSTUS	36	5	0	36	36	31	5	1	36	14	22
9	SEPTEMBER	75	3	0	75	75	72	3	1	75	27	48
10	OKTOBER	54	2	0	54	54	52	2	1	54	23	31
11	NOVEMBER	81	5	0	81	81	76	5	1	81	33	48
12	DESEMBER	25	2	0	25	25	23	2	1	25	13	12
	TOTAL	470	30	0	470	470	440	30		470	213	257

Seluruh permohonan informasi dapat diselesaikan dengan waktu penyelesaian rata-rata 1 hari, yang menunjukkan kinerja pelayanan informasi publik yang cepat dan responsif.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPID BRBIH selama tahun 2025 telah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel, dengan tingkat penerimaan permohonan yang tinggi serta pemanfaatan layanan online yang terus meningkat.

- **Kehumasan Pengelolaan Website dan Media Sosial**

BRBIH melalui website <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-riset-budidaya-ikan-hias-depok/> menyajikan informasi kepada publik terkait dengan:

- Struktur Kelembagaan
- Tugas dan Fungsi
- Profil Pejabat
- Petunjuk Teknis
- Petunjuk Pelaksanaan

- f. Standar Layanan
- g. FAQ Magang dan PKL BRBIH
- h. Standar Pelayanan Informasi Publik KKP
- i. Surat Tugas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- j. Kode Etik Pelayanan
- k. Standar Pelayanan Pemanfaatan Aset
- l. Standar Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis
- m. Biaya Waktu dan Pelayanan
- n. Maklumat Pelayanan
- o. Mekanisme Pelayanan
- p. Standar Operasional Prosedur
- q. Daftar Informasi Publik
- r. Permohonan Informasi
- s. Permohonan Audiensi/ Konsultasi
- t. Pengajuan Keberatan

Berdasarkan informasi yang dibagikan melalui website, BRBIH mendapatkan penilaian atas keterbukaan informasi publik melalui aplikasi PELIKAN. Berdasarkan hasil penilaian di tahun 2025, BRBIH mendapatkan nilai 99,05 yang berarti BRBIH merupakan Satker yang Informatif kepada Publik.

Selain website, untuk menunjang pelayanan serta keterbukaan informasi publik, BRBIH menggunakan platform media sosial. Sepanjang tahun 2025, Tim Kreatif Pelayanan Teknis Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) telah menghasilkan sekitar 550 tayangan konten kreatif. Seluruh konten tersebut dipublikasikan melalui media sosial resmi BRBIH dan dapat diakses melalui tautan berikut: <https://surl.li/abdsqr>.

Berikut tabel perbandingan jumlah followers per Desember 2025 dan pertumbuhan jumlah followers sejak Januari s.d Desember 2025 dari lima media sosial BRBIH.

Tabel 15 Perbandingan Jumlah Followers per Desember 2025

No	Platform	Jumlah Followers		Pertumbuhan (%)
		Januari	Desember	
1	Instagram	4.003	5.207	30,00
2	Youtube	7.843	8.160	4,04
3	Tiktok	473	837	76,96
4	Facebook	-	625	625
5	Twitter	1.871	1.870	-0,05

Berdasarkan tabel perbandingan diatas, hanya satu dari lima platform yang memiliki tingkat pertumbuhan negative, namun tidak signifikan. Sedangkan empat dari lima

platform menunjukkan tingkat pertumbuhan berkisar antara 4,04 – 625%, hal ini mengindikasikan bahwa akun secara aktif memproduksi konten dan mampu mempertahankan ketertarikan audiens secara berkelanjutan.

Jika dilihat dari pertumbuhan positif, Facebook dan Tiktok menunjukkan tingkat pertumbuhan yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan platform tersebut memiliki karakteristik berupa jangkauan stabil, potensi skalabilitas tinggi dan efektif sebagai media diseminasi informasi.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengelolaan media sosial dan website Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH), dapat disimpulkan bahwa keberadaan website dan media sosial merupakan sarana strategis dalam mendukung keterbukaan informasi publik, penyebaran informasi kegiatan, serta peningkatan citra lembaga kepada masyarakat.

Website dan media sosial BRBIH telah dimanfaatkan sebagai media komunikasi dan publikasi berbagai informasi kelembagaan, program, serta capaian kinerja. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan visibilitas website pada mesin pencari, perlunya pembaruan data PPID secara berkelanjutan, serta keterbatasan sarana pendukung dan sumber daya manusia dalam pengelolaannya.

Pengelolaan media sosial dan website yang optimal memerlukan dukungan lintas bidang, pemeliharaan keamanan sistem, peningkatan kapasitas pengelola, serta komitmen untuk melakukan pembaruan informasi secara rutin dan berkesinambungan. Dengan adanya perbaikan dan tindak lanjut sesuai rekomendasi yang telah disusun, diharapkan website dan media sosial BRBIH dapat berfungsi lebih efektif sebagai media informasi publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengelolaan website dan media sosial Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) pada tahun 2025, website BRBIH saat ini hanya dapat diakses melalui tautan PPID. Meskipun demikian, pengelolaan website tetap perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar informasi dan komunikasi kepada masyarakat dapat terus tersampaikan sesuai dengan perkembangan kegiatan dan program di BRBIH. Adapun jumlah pengunjung website tercatat sebanyak 8.520 pengunjung.

Seiring dengan adanya perubahan pengelolaan website oleh PUSDATIN, website terbaru BRBIH berada pada alamat PPID KKP dan masih relatif sulit ditemukan melalui mesin pencari (search engine/Google). Website tersebut baru dapat diakses setelah

pengguna terlebih dahulu membuka laman utama PPID KKP dan melakukan pencarian lokasi BRBIH Depok, sehingga diperlukan upaya peningkatan visibilitas akses website.

Dengan terlaksananya pengelolaan website dan media sosial tersebut, diharapkan ke depannya BRBIH dapat terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang transparan, cepat, serta mudah diakses oleh masyarakat secara lebih efektif dan efisien.

- **Pengumpulan Artikel untuk Kegiatan di Website**

Pada Tahun 2025 Jumlah Artikel yang telah masuk untuk kegiatan website sebagai berikut :

Tabel 16 Artikel pada Website 2025

No	Tanggal Terbit	Judul Artikel	Nama Penulis	Jumlah Halaman	Link
1	16 Mei 2025	Ekstrak Ginseng Agar Ikan Cupang Agresif	Nina Meilisza	10	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-ri-set-budidaya-ikan-hias-depok/news/detail/ekstrak-ginseng-agar-ikan-cupang-agresif/
2	2 Juli 2025	Mengenal Ikan Glofish Tetra Lebih Dekat	Gleni Hasan Huwoyon	10	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-ri-set-budidaya-ikan-hias-depok/news/detail/mengenal-ikan-glofish-tetra-lebih-dekat/
3	29 Desember 2025	Arwana Si Raja Ikan Asia Peluang Bisnis Menggiurkan Hingga Upaya Pelestarian	Rina Hirnawati	10	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-ri-set-budidaya-ikan-hias-depok/news/detail/arwana-si-raja-ikan-asia-peluang-bisnis-menggiurkan-hingga-upaya-pelestarian/
4	30 Desember 2025	Apakah Daun Turi Dapat Digunakan Untuk Pigmentasi Dan Pertumbuhan Ikan Hias?	Nina Meilisza	10	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-ri-set-budidaya-ikan-hias-depok/news/detail/apakah-daun-turi-dapat-digunakan-untuk-pigmentasi-dan-pertumbuhan-ikan-hias/

- **Kerjasama dengan Instansi Pemerintah atau Swasta**

Kerjasama instansi pemerintah atau swasta merupakan kegiatan yang dilakukan antar instansi pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan bersama, dengan kerjasama akan lebih mudah untuk menyelesaikan kegiatan karena kita memiliki patner atau rekan untuk bertukar pikiran maupun penggunaan sarana/prasarana sehingga dapat berjalan dan terselesaikan dengan cepat dan dengan hasil yang maksimal. Bentuk Kerja Sama yang dilaksanakan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai PERMEN KP 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja KKP adalah Kesepakatan Bersama (KB), Nota Kesepahaman/Kesepakatan (NK), Memorandum Saling Pengertian (MSP) untuk Ormas Asing, Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama menerapkan prinsip-prinsip sesuai Permen KP No. 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berikut daftar kerja sama yang telah dilaksanakan oleh Balai Riset Budidaya Ikan Hias bersama instansi lainnya :

Tabel 17 Daftar Kerjasama di Tahun 2025

No	Tanggal	Jangka waktu	Instansi	Nomor Perjanjian Kerja Sama	Tentang
1.	21 April 2025	3 Tahun	BRBIH dan FMIPA Univeritas Pakuan	36/BPPSDM/KKP/PKS/V/2025 dan 93/D/FMIPA/IV/2025	Perjanjian Kerja Sama Program Pengembangan Tri Dharma Pendidikan Tinggi
2.	08 Desember 2025	1 Tahun	BRBIH dan Hotel Bumi Wiyata Depok	84/BPPSDM/KKP/PKS/XII/2025 dan 016/I-MGT/PK/HBW/XII/2025	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyediaan Bahan Baku Sisa Organik Makanan
3.	08 Desember 2025	1 Tahun	BRBIH dan Hotel Fave Margonda Depok	83/BPPSDM/KKP/PKS/XII/2025 dan 021/SK-HRC/FHMD/XII/2025	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyediaan Bahan Baku Sisa Organik Makanan
4.	08 Desember 2025	1 Tahun	BRBIH dan Hotel Santika Depok	85/BPPSDM/KKP/PKS/XII/2025 dan 017/EO-HSD/BRBIH/PKS/XII/2025	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyediaan Bahan Baku Sisa Organik Makanan
5.	08 Desember 2025	1 Tahun	BRBIH dan Hotel	86/BPPSDM/KKP/PKS/XII/2025	Pengembangan

			Savero Margonda Depok	dan 003/A&G/BRBIH/PKS/XII/2025	Sumber Daya Manusia dan Penyediaan Bahan Baku Sisa Organik Makanan
--	--	--	-----------------------	--------------------------------	--

- **Kegiatan Promosi**

Pada tahun 2025, BRBIH melakukan kegiatan promosi melalui dua event yang dilaksanakan di BRBIH, berikut penjelasannya:

1) **Ceria Fest**

Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Depok menyelenggarakan CERIA FEST 2025, sebuah kegiatan edukatif dan rekreatif yang bertujuan memperkenalkan potensi ikan hias dan pakan kepada masyarakat luas. Kegiatan ini dibuka untuk umum dihadiri oleh sekitar 1.500 peserta yang berasal dari berbagai unsur, antara lain pegawai BRBIH, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok, Dinas Kesehatan Kota Depok, Komunitas Local Feed, siswa-siswi Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak se-Kota Depok beserta guru dan orang tua, serta warga RW 1 dan RW 2 Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok.

CERIA FEST 2025 menjadi wadah kebersamaan yang mengintegrasikan edukasi ikan hias, kesehatan, seni, dan hiburan, sekaligus melibatkan masyarakat umum, pelajar, dan pelaku UMKM. Melalui kegiatan ini, BRBIH berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kecintaan terhadap ikan hias dan pakan, pentingnya kesehatan, pengembangan kreativitas, serta mendorong pemberdayaan ekonomi lokal.

Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) merupakan unit kerja pemerintah di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan ini, BRBIH bersinergi dengan berbagai mitra strategis, termasuk masyarakat, lembaga pendidikan, mitra swasta, pemerintah daerah, dan media, sebagai upaya memperluas jangkauan promosi dan pengenalan ikan hias kepada publik.

Kegiatan CERIA FEST 2025 diselenggarakan pada Kamis–Jumat, 21–22 Agustus 2025, bertempat di Balai Riset Budidaya Ikan Hias. Adapun tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan ruang ekspresi dan pengalaman edukatif kepada masyarakat melalui konsep eduwisata, serta memperkuat kolaborasi antarinstansi dan masyarakat melalui partisipasi aktif. Rangkaian kegiatan yang diselenggarakan meliputi:

1. **Pembukaan dan pentas seni**

2. Eduwisata, belajar mengenal ikan hias dan pakan
3. Lomba Mewarnai Ikan Hias
4. Bazar Murah dan UMKM produk ikan, olahan ikan dan lainnya
5. Senam Ceria bersama masyarakat
6. Sosialisasi BPJS Kesehatan
7. Pemeriksaan kesehatan gratis
8. Lomba dalam rangka HUT

- 2) Kontes Ikan Cupang Hias, Pameran dan Bazar Hasil Pertanian dan Perikanan
 Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-26 Kota Depok, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Depok bekerja sama dengan Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Kontes Ikan Cupang Hias, Pameran, dan Bazar Hasil Pertanian dan Perikanan”. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, pada 5–6 Mei 2025, bertempat di Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH), Kota Depok, sebagai upaya memperkenalkan dan mempromosikan potensi ikan hias, khususnya ikan cupang, kepada masyarakat luas.

Pada hari kedua, 6 Mei 2025, acara semakin semarak dengan kehadiran siswa-siswi Sekolah Dasar yang mengikuti kegiatan senam bersama serta edukasi bertema “Ayo Menanam”. Para siswa memperoleh pengalaman langsung melalui praktik menanam bibit tanaman dan pengenalan budidaya ikan hias, sebagai sarana menumbuhkan minat sejak dini terhadap sektor pertanian dan perikanan.

Didampingi oleh penyuluh pertanian dan perikanan, para siswa berkesempatan mengikuti eduwisata BRBIH, mengunjungi berbagai klaster edukatif seperti Low Carbon Feed, Arwana, Aquatia, dan Showroom Ikan Hias. Kegiatan ini dipandu langsung oleh teknisi dan penyuluh BRBIH untuk memberikan pemahaman mengenai teknologi, inovasi, serta keunggulan ikan hias Indonesia.

Rangkaian acara juga dimeriahkan dengan Bazar Hasil Pertanian dan Perikanan yang menampilkan berbagai produk unggulan, antara lain sembako murah, sayuran segar berkualitas, aneka olahan hasil perikanan, serta pembagian bibit pohon secara gratis kepada masyarakat. Selain itu, tersedia layanan edukasi pertanian terbuka yang dapat diikuti oleh pengunjung dari berbagai kalangan.

Sebagai puncak kegiatan, diselenggarakan Kontes Ikan Cupang Hias Wali Kota Cup 2025, yang diikuti oleh peserta dari Kota Depok maupun daerah lainnya. Kontes ini menjadi ajang promosi ikan cupang hias sekaligus wadah bagi para pegiat dan pecinta ikan hias untuk menampilkan kualitas, keindahan, serta potensi ekonomi ikan cupang sebagai komoditas unggulan perikanan hias.

2. Layanan Umum

Kegiatan Layanan Umum telah dilaksanakan selama 12 bulan sejak Januari s.d Desember 2025, dengan capaian realisasi output berupa 1 layanan. Realisasi anggaran pada layanan ini sebesar 100%. Layanan yang dilaksanakan berupa pengelolaan rumah tangga, persuratan dan pengelolaan BMN berupa aktifitas menghimpun, mencatat, mengagendakan, mengelola dan menyimpan dokumen-dokumen yang dianggap penting dalam pengambilan keputusan dan menyusun kebijakan.

Dalam pelaksanaan kegiatan, BRBIH secara aktif mengikuti pelaksanaan kegiatan kearsipan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal KKP. Kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait juga rutin dilaksanakan agar informasi maupun data yang dibutuhkan dapat diupdate sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan ini sebagian besar dilaksanakan secara online mengingat kebijakan efisiensi anggaran di tahun ini.

Sampai dengan akhir tahun 2025, rekapitulasi jumlah lalu lintas persuratan dan dokumen/buku baik surat masuk maupun surat keluar BRBIH dapat disajikan dalam tabel di bawah ini. Seluruh persuratan telah melalui portal.kkp.go.id

Tabel 18. Jumlah lalu lintas persuratan

No	Kategori	Jumlah
1	Surat Masuk	795
2	Surat Keluar	315

3. Layanan Perkantoran

Kegiatan layanan perkantoran merupakan layanan yang mengakomodir pembayaran belanja pegawai dan belanja operasional. Output pada layanan ini berupa 1 layanan yang telah dilaksanakan selama Januari s.d Desember 2025, dengan realisasi anggaran sebesar 98,47% dari pagu anggaran layanan.

Pembayaran belanja pegawai yang meliputi belanja gaji dan tunjangan ASN selama tahun 2025 adalah sebesar Rp 4.440.770.234,- dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 19 Rincian pembayaran belanja pegawai per jenis ASN

ASN	Jumlah (orang)	Gaji dan Tunjangan yang melekat	Uang Makan	Tunjangan Kinerja
PNS	26	1.850.541.730	210.553.000	1.845.305.234
PPPK	18	236.781.379	47.019.000	250.569.891
Total	44	2.087.323.109	257.572.000	2.095.875.125

Untuk belanja operasional pemeliharaan kantor di tahun 2025, telah dilakukan pembayaran atas belanja sebagai berikut:

Tabel 20 Realisasi belanja pada komponen operasional dan pemeliharaan kantor

Sub Komponen	Realisasi Belanja (Rp)
Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran	2.432.705.214
Langganan Daya dan Jasa	450.116.557
Pemeliharaan Kantor	402.150.430
Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	94.130.000
Jumlah	3.379.102.201

Kegiatan pemeliharaan asset, produksi ikan dan magot merupakan bagian

Pada pembayaran keperluan sehari-hari perkantoran selain mengakomodir kebutuhan sehari-hari seperti air minum pegawai, juga dibayarkan honor dan iuran BPJS Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 16 orang selama 9 bulan dengan 1 bulan Tunjangan Hari Raya (THR)), pembayaran honor dan iuran BPJS Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) selama 12 bulan dan 1 bulan THR kebutuhan makan dan minum untuk rapat dan jamuan tamu, penyediaan pakan dan alat bahan bantu operasional produksi, alat bahan bantu media digital dan. Untuk langganan daya dan jasa telah dilakukan pembayaran atas tagihan listrik sebanyak 5 nomor ID Pelanggan, biaya langganan telepon dan internet.

Untuk komponen pemeliharaan kantor, telah diakomodir layanan atas pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin,

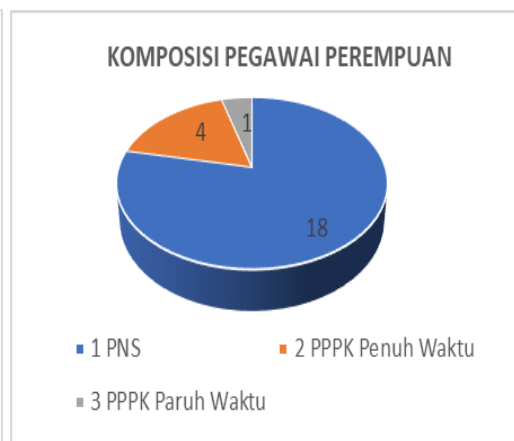
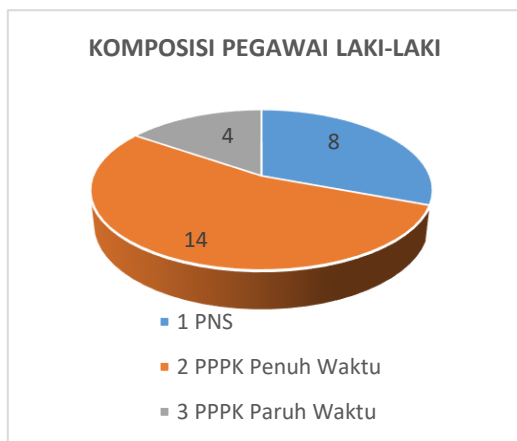
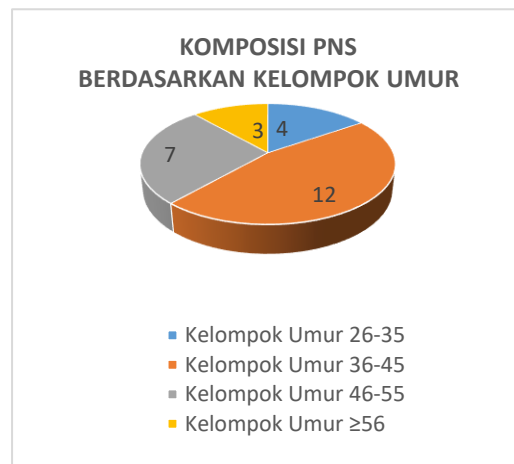
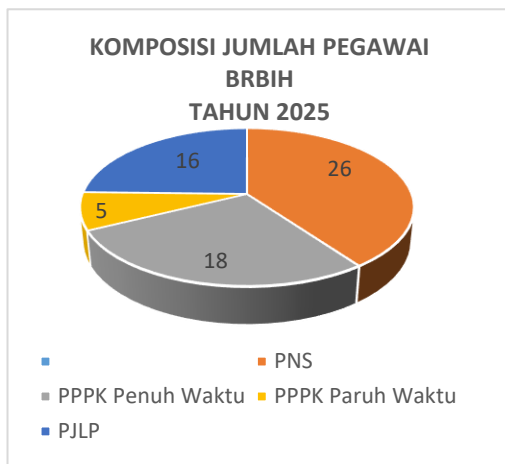
4. Layanan Manajemen SDM

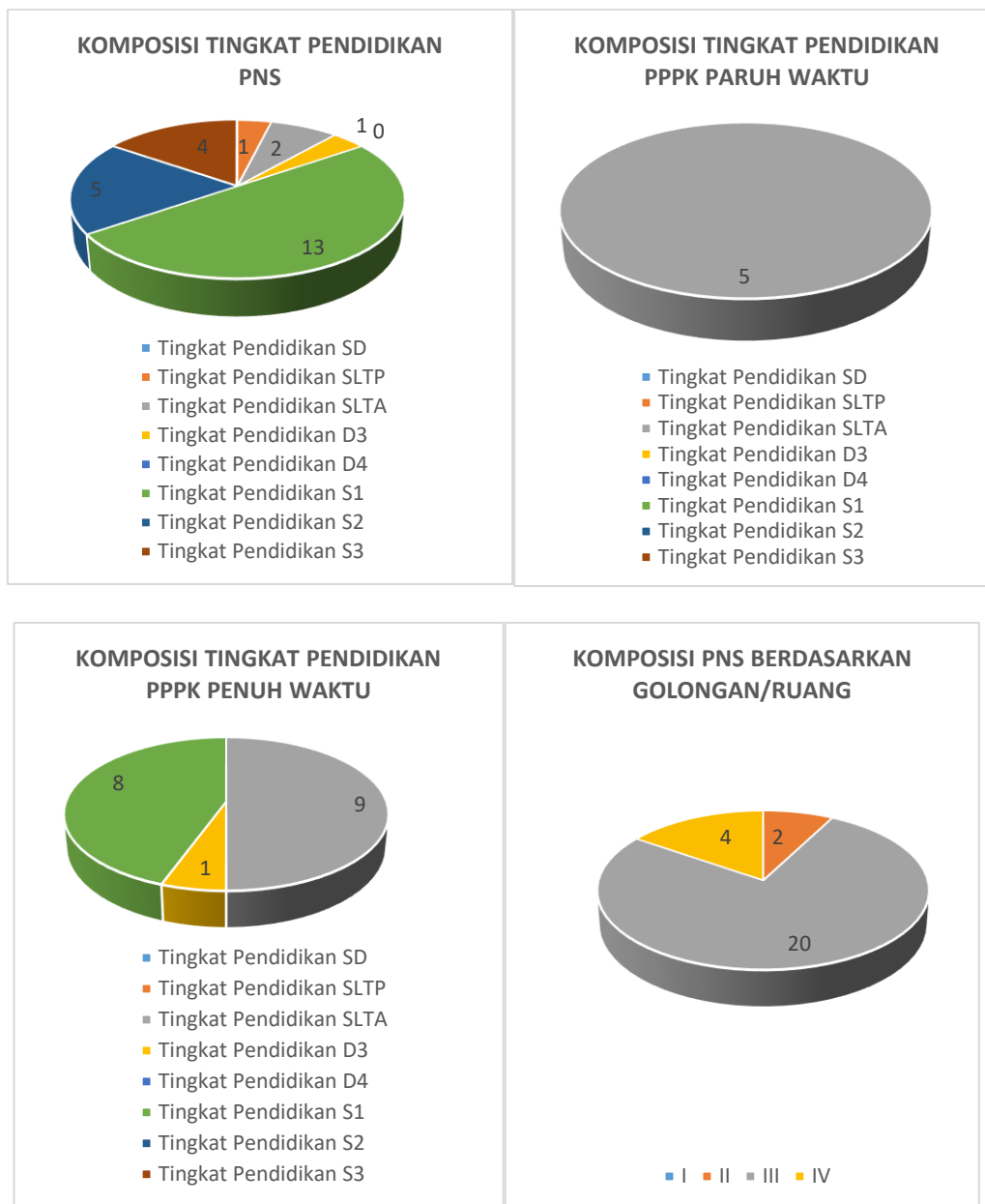
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah serangkaian proses pengelolaan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN antara lain meliputi kegiatan:

- Penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- Pengadaan;
- Pangkat dan jabatan;
- Pengembangan karier;

- e. Mutasi;
- f. Penilaian kinerja;
- g. Penggajian dan tunjangan;
- h. Penghargaan;
- i. Disiplin; dan
- j. Pemberhentian.

Per 31 Desember 2025, jumlah pegawai Balai Riset Budidaya Ikan Hias adalah 65 orang dengan rekapitulasi keragaan berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, golongan, pendidikan, dan jabatan sebagaimana disajikan dalam grafik di bawah ini:





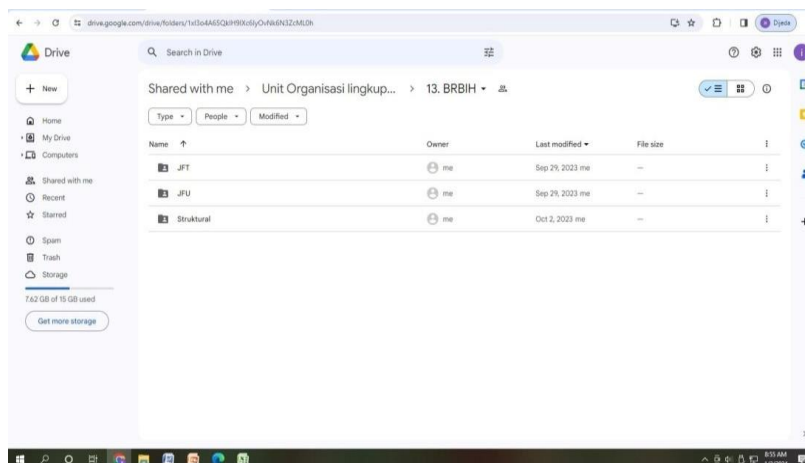
Gambar 2. Grafik keragaan pegawai BRBIH (per 31 Desember 2025)

Berdasarkan grafik di atas secara umum dapat diketahui bahwa pegawai BRBIH berada dalam kondisi produktif baik dari aspek usia, pendidikan, ataupun secara kapasitas. Hal ini telah sesuai dan memenuhi kebutuhan peta jabatan dimana hasil analisa jabatan pada setiap jabatan bernilai sekurang-kurangnya baik.

Kegiatan layanan manajemen SDM telah dilakukan, dengan output yang dihasilkan sesuai berupa 1 layanan. Sejumlah rangkaian kegiatan layanan manajemen SDM yang dilakukan selama tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

- **Penyusunan dan penetapan kebutuhan**

Telah disusun analisis jabatan dan analisis beban kerja BRBIH sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2020. Anjab dan ABK yang disusun telah disampaikan kepada Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP untuk selanjutnya diinput ke dalam aplikasi e- formasi, sebagai bahan pengusulan formasi pengadaan calon ASN.



Gambar 3. Tangkapan layar analisis jabatan dan analisis beban kerja BRBIH

- **Pengadaan pegawai**

Pada hakikatnya rekrutmen pegawai dimaksudkan untuk menjamin bahwa kebutuhan SDM bagi organisasi tetap terpenuhi secara konstan dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Dengan terpenuhinya kebutuhan pegawai dalam organisasi dan penempatan pegawai yang tepat diharapkan memberikan perbaikan terhadap kinerja organisasi/

- **Pangkat dan Jabatan**

Pada tahun 2025, telah diusulkan dan terbit surat keputusan naik pangkat dan naik jabatan pada periode April dan Juni bagi pegawai BRBIH sebagai berikut:

Tabel 21. Kenaikan Pangkat Pegawai

No	Nama Pegawai	Pangkat Lama	Pangkat Baru	Periode
1	Bunga Laili Meliani	Pengatur, II/c	Pengatur Tk.I, II/d	April
2	Herminingsih, S.PKP	Penata, III/c	Penata Tk.I, III/d	April

- **Pengembangan Karier**

- 1) Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier, dan setiap ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi ASN yang bersangkutan. Pengembangan kompetensi bagi setiap ASN dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Pengembangan kompetensi menjadi dasar pengembangan karier dan menjadi salah satu dasar bagi pengangkatan Jabatan.

Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk: pendidikan; dan/atau pelatihan. Pada tahun 2025, pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dengan skema izin belajar sebagai berikut:

Tabel 22. Pegawai Izin belajar 2025

No	Nama	Jabatan	Jenjang/Prodi	TMT
1	Nur Arief Hidayat, S.E.	Penyusun Laporan Keuangan	S2 - Manajemen	September 2022

Tabel 23. Usulan Pegawai Tugas Belajar/Izin Belajar Tahun 2025

No	Nama	Jabatan	Usulan Izin Belajar
1	Iswahyudi, A.Md.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	S1/Administrasi Bisnis
2	Khairin Nisa, S.I.Kom.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	S2/Illmu Manajemen
3	Bunga Laili Meliani	Pengadministrasi Umum	S1/Manajemen
4	Shella Savitri, A.Md.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	S2/Manajemen

Adapun pengembangan kompetensi melalui pelatihan telah dilaksanakan oleh seluruh pegawai BRBIH berupa keikutsertaan dalam diklat/seminar/workshop/sosialisasi dan lain-lain paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran. Hal tersebut dapat dilihat pada capaian Indeks Profesionalitas ASN KKP sebagai berikut:



IP ASN 2025

Dashboard

Eselon

Pegawai

FAQ

IP ASN 2024

1

troubleshooting permasalahan IP-ASN bisa dicek pada halaman berikut: [faq-troubleshooting-permasalahan-ip-asn](#)

#	Nama	Kualifikasi		Kompetensi						Kinerja		Disiplin		TOTAL	Keterangan
		Tingkat Pendidikan	IP	Kinerja	Diklat PIM	Diklat Fungsional	Diklat Teknis	Diklat 20 JP	IP	Predikat Kinerja	IP	Hukuman Disiplin	IP		
1	JONI HARYADI D	S-3	25	25	10	-	-	5	40	SANGAT BAIK	30	0	5	100	SANGAT TINGGI
2	GLENI HASAN HUWOYON	S-1	25	20	10	-	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
3	MELTA RINI FAHMI	S-3	25	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
4	ARMIN HIDAYAT	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
5	ENDAH SUSIYANTI	S-2	25	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
6	NINA MELISZA	S-3	25	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
7	DEWINTA HESTI WIDYASTANTRI	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
8	RINA HIRNAWATI	S-2	25	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
9	BAYU	S-1	25	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
10	NUSAIBAH AN NUURIAH	S-1	25	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
11	KHAIRIN NISA	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
12	SUSIYANTI	S-2	25	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
13	TATIK MUFIDAH	S-3	25	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
14	HERMININGSIH	S-1	25	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
15	IFANA AGUSTINA	S-1	25	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI

16

YUNI SETYOWATI

17

SHOFI HAR SINANSARI

18

NUR ARIEF HIDAYAT

19

FITRI RAHMAWATI

20

ADINDA RIZKYLIA SHAHRANI

21

ISWAHYUDI

22

ACHMAD MAULANA

23

SITI HAIRIAH

24

SHELLA SAVITRI

25

BUNGA LAILI MELIANI

26

NIAN

27

EDITA EKA PRASETIA

#	Nama	Kualifikasi		Kompetensi						Kinerja		Disiplin		TOTAL	Keterangan
		Tingkat Pendidikan	IP	Kinerja	Diklat PIM	Diklat Fungsional	Diklat Teknis	Diklat 20 JP	IP	Predikat Kinerja	IP	Hukuman Disiplin	IP		
16	YUNI SETYOWATI	S-1	25	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
17	SHOFI HAR SINANSARI	S-2	25	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
18	NUR ARIEF HIDAYAT	S-1	25	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
19	FITRI RAHMAWATI	S-1	25	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
20	ADINDA RIZKYLIA SHAHRANI	S-2	25	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
21	ISWAHYUDI	D-III	25	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
22	ACHMAD MAULANA	D-II/D-I/SMA	20	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
23	SITI HAIRIAH	D-II/D-I/SMA	20	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
24	SHELLA SAVITRI	S-1	25	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
25	BUNGA LAILI MELIANI	S-1	25	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
26	NIAN	SMP/SD	10	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	75	SEDANG
27	EDITA EKA PRASETIA	S-1	25	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI

Gambar 4. Tangkapan layar pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pegawai BRBIH Tahun 2024, sumber website ropeg.kkp.go.id

2) Pengangkatan PPPK

Sebanyak 16 (enam belas) pegawai PPNP Balai Riset Budidaya Ikan Hias telah diangkat sebagai PPPK Baru Balai Riset Budidaya Ikan Hias per periode Bulan Oktober 2025. Balai juga menerima 1 pegawai PPPK dari luar BRBIH. Sehingga total pegawai PPPK di Balai sebanyak 18 orang dengan rincian per golongan sebagai berikut:

Tabel 24. PPPK pada Satker BRBIH per 31 Desember 2025

Golongan	Jumlah (Orang)	Nama Pegawai
V	10	Asep Solihin, Marjono, Moch. Hasan, Rica Gartika, Rona Drajat Agung, Septian Firmansyah, Suryadi, Tomi Saputra, Agil Wahyu Dananto
VII	1	Achmaidi Rinal
IX	8	Acep Sutisna, Budi Setiawan, Danio Israhadi Fortrana, Dinar Tri Agustina, Fajriyani, Ipan Dahniar, Rachmawati Fauziah, Edita Eka Prasetia

• Mutasi

Sepanjang tahun 2025, Balai Riset Budidaya Ikan Hias menerima beberapa permohonan mutasi alih tugas baik dari internal Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun dari eksternal Dinas Pemerintahan Daerah. Proses mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan formasi Balai sebagaimana tertuang dalam peta jabatan Balai yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64 Tahun 2022, serta standar operasional prosedur yang berlaku.

Adapun proses mutasi pegawai sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Proses Mutasi Pegawai

No.	Nama	Instansi Pindah	TMT
1	Rangga Wiryawan, S.Pi.	Mutasi Keluar (Pemerintah Kota Sukabumi)	1 Juli 2025

• Evaluasi kinerja pegawai

Evaluasi kinerja pegawai merupakan suatu proses dimana pejabat penilai kinerja mereviu hasil kerja dan perilaku kerja pegawai secara periodik dan tahunan serta menetapkan predikat kinerja berdasarkan kuadran kinerja pegawai. Evaluasi kinerja pegawai baik bagi PNS maupun PPPK diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, evaluasi kinerja ASN dilakukan secara periodik per triwulan (TW) dan tahunan melalui aplikasi e-kinerja yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Sampai dengan bulan Desember 2025, Balai Riset Budidaya Ikan Hias telah melaksanakan evaluasi kinerja periodik sebanyak 3 (tiga) triwulan, yaitu:

- a) evaluasi kinerja TW 1 (Januari – Maret), sebanyak 28 pegawai;
- b) evaluasi kinerja TW 2 (April – Juni), sebanyak 28 pegawai; dan;
- c) evaluasi kinerja TW 3 (Juli – September), sebanyak 26 pegawai.

Pada awal Januari 2026 akan dilakukan evaluasi kinerja TW 4 sekaligus evaluasi kinerja tahunan untuk keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja pegawai selama tahun 2025. Pada periode ini akan ada perubahan jumlah pegawai menjadi 49 dokumen, hal ini dikarenakan terdapat penambahan PPPK Penuh Waktu (17 Pegawai) dan PPPK Paruh Waktu (5 Pegawai).

• Penghargaan

Pada tanggal 17 Agustus 2025, telah dianugerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada sejumlah pegawai yang bekerja secara terus-menerus selama 10 tahun, 20 tahun sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya. Pegawai-pegawai tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Pegawai penerima penghargaan Satyalancana Karya Satya

No	Nama	Satyalancana Karya Satya
1	Susiyanti, S.Pi., M.Ak.	SLKS XX Tahun
2	Iswahyudi, A.Md	SLKS XX Tahun
3	Gleni Hasan Huwoyon, S.Pi	SLKS X Tahun
4	Bayu, A.Md, AK	SLKS X Tahun
5	Shella Savitri, A.Md	SLKS X Tahun
6	Nusaibah An Nuuriah, A.Md	SLKS X Tahun

• Disiplin

Disiplin pegawai diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang memuat kewajiban dan larangan bagi PNS, yang dalam hal ini diterapkan juga kepada pegawai pemerintah non PNS. Sepanjang tahun 2025, sampai dengan 31 Desember 2025, tidak ada pegawai BRBIH yang dijatuhi hukuman disiplin. Namun demikian upaya penegakkan disiplin tetap dilakukan melalui pengawasan melekat oleh atasan langsung dan melalui sosialisasi tentang disiplin pegawai kepada seluruh pegawai BRBIH.

- **Pemberhentian**

Pada tahun 2025 terdapat beberapa pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun (BUP), dan telah terbit SK Pemberian Pensiun kepada pegawai- pegawai berikut:

Tabel 27. Pegawai yang mencapai BUP

No	Nama	Jabatan Terakhir	TMT
1	Nasik	Teknisi Sarana dan Prasarana	1 Mei 2025

- **Cuti**

Sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2025 jumlah hari kerja adalah sebanyak 261 hari, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat perjalanan dinas pegawai, cuti tahunan, cuti sakit. Rekapitulasi cuti dan perjalanan dinas ASN selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Rekapitulasi Cuti ASN

No	Nama	NIP	Jabatan	Jumlah cuti yang diambil
STRUKTURAL				
1	Gleni Hasan Huwoyon, S.Pi.	19801206 201406 1 001	Kepala Subbagian Umum	4
KELOMPOK FUNGSIONAL				
1	Endah Susiyanti, S.P.	19740311 199703 2 001	Pranata Humas Muda	4
2	Armin Hidayat, S.E.	19680628 199303 1 003	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda	5
3	Rangga Wiryawan, S.Pi.	19820725 200312 1 004	Perencana Muda	10
4	Nusaibah An Nuuriah, A.Md.	19921206 201503 2 005	Pranata Keuangan APBN Mahir	10
5	Dewinta Hesti Widyastantri, S.E.	19870109 200912 2 001	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda	6
6	Khairin Nisa, S.I.Kom.	19920318 202012 2 005	Analisis Kepegawaian Pertama	10
7	Dr. Melita Rini Fahmi, S.Pi., M.Si.	19760611 200604 2 006	Instruktur Madya	8
8	Dr. Nina	19810507 200801 2 007	Instruktur Muda	14

	Meilisza, S.Pi., M.Si.			
9	Rina Hirnawati, S.Pi., M.Si.	19800131 200901 2 004	Instruktur Pertama	10
10	Bayu, A.Md.Ak.	19920611 201503 1 001	Teknisi Akuakultur	8
11	Edita Eka Prasetya	198002262023211005	Pranata Komputer	7
PELAKSANA				
1	Fitri Rahmawati, S.Sos.	19810723 200812 2 003	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	6
2	Nur Arief Hidayat, S.E.	19780318 200912 1 003	Penyusun Laporan Keuangan	7
3	Bunga Laili Maelani	19851006 201212 2 001	Pengadministrasi Umum	10
4	Ifana Agustina, S.H.	19840815 200801 2 001	Analisis SDM Aparatur	8
5	Hermarningsih, S.PKP.	19820920 200701 2 001	Pengelola Persuratan	3
6	Adinda Rizkylia Shahrani, S.Pi., M.Si.	19801105 201001 2 018	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	11
7	Siti Hairiah	19690519 199203 2 002	Pengelola Kepegawaian	12
8	Shella Savitri, A.Md.	19920811 201503 2 001	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	7
9	Iswahyudi, A.Md.	19821229 200502 1 001	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	11
10	Nian	19690124 199803 1 004	Teknisi Sarpras	7
11	Shofihar Sinansari, S.Pi., M.P.	19841123 200901 2 008	Fungsional Umum Tugas Belajar	2
12	Susiyanti	197803192005022000	Pengelola Program dan Laporan	8
13	Yuni Setyowati	198206222009012006	Pengelola Layanan Kehumasan	8

Tabel 29. Rekap Perjalanan Dinas ASN

No	Nama	NIP	Jabatan	Jumlah Perjalanan Dinas
STRUKTURAL				
1	Dr. Joni Haryadi D., M.Sc.	19730603 200312 1 002	Kepala Balai	1
KELOMPOK FUNGSIONAL				

1	Dr. Nina Meilisza, S.Pi., M.Si.	19810507 200801 2 007	Instruktur Muda	1
---	------------------------------------	-----------------------	--------------------	---

- **Administrasi Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan**

Sebagai komitmen Balai Riset Budidaya Ikan Hias terhadap perlindungan kesehatan dan sosial ekonomi terhadap pegawai, maka selain untuk ASN, BRBIH juga mengikutsertakan Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) dan Pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebagai peserta Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang mencakup Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Kecelakaan Kerja. Bagian kepegawaian melakukan kegiatan administrasi berupa pengelolaan aplikasi, pencetakan billing, pendaftaran peserta baru/anggota keluarga, non aktif, dan lain-lain. Berikut adalah rekapitulasi peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan per 31 Desember 2025:

Tabel 30. Rekap Peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

No	Nama	Masa Berlaku	Ket
1	Acep Sutisna	2025-09-30	PPNPN
2	Achmaidi Rinal	2025-09-30	PPNPN
3	Asep Solihin	2025-09-30	PPNPN
4	Budi Setiawan	2025-09-30	PPNPN
5	Danio Israhadi Fortrana	2025-09-30	PPNPN
6	Dinar Tri Agustina	2025-09-30	PPNPN
7	Fajriyani	2025-09-30	PPNPN
8	Ipan Dahniar	2025-09-30	PPNPN
9	Marjono	2025-09-30	PPNPN
10	Moch. Hasan	2025-09-30	PPNPN
11	Rachmawati Fauziah	2025-09-30	PPNPN
12	Rica Gartika	2025-09-30	PPNPN
13	Rona Drajat Agung	2025-09-30	PPNPN
14	Septian Firmansyah	2025-09-30	PPNPN
15	Suryadi	2025-09-30	PPNPN
16	Tomi Saputra	2025-09-30	PPNPN
17	Yudi	2025-09-30	PPNPN
18	Arfhan Dhedhy	2025-12-31	PJLP
19	Ade Iskandar	2025-12-31	PJLP
20	M Abdul Kholik	2025-12-31	PJLP
21	Dede Sutisna	2025-12-31	PJLP
22	Sahid Sudirman	2025-12-31	PJLP
23	Agus Somantri	2025-12-31	PJLP
24	Wawan Hermawan	2025-12-31	PJLP
25	Hamdanih	2025-12-31	PJLP
26	Ahmad Rokib	2025-12-31	PJLP

27	Teguh Arif Yanto	2025-12-31	PJLP
28	Alvianur Rizky	2025-12-31	PJLP
29	Supriyanto	2025-12-31	PJLP
30	Nuriman	2025-12-31	PJLP
31	Ahmad Habibi Putra	2025-12-31	PJLP
32	Muhammad Okky Prasetyo	2025-12-31	PJLP
33	Santy	2025-12-31	PJLP
34	Ayu Widi Wardani	2025-12-31	PJLP
35	Romansyah	2025-12-31	PJLP
36	Haris Zulfikar	2025-12-31	PJLP

5. Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Pelaksanaan layanan perencanaan dan penganggaran telah dilakukan selama tahun 2025 dengan output berupa 1 dokumen yaitu dokumen DIPA dan RKK BRBIH Tahun 2026 dalam kondisi efisiensi anggaran. Realisasi anggaran pada layanan ini sebesar Rp 5.863.797,- atau 99,47%, mencakup belanja ATK dan Bahan Komputer.

Pada awal tahun 2025, BRBIH melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja yang meliputi penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi dan Manual Indikator Kinerja. Dokumen ini sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja di tahun 2025. Pada pelaksanaannya, di bulan Desember 2025 dilakukan penyesuaian target pada PK, berikut tabel sasaran kegiatan, indikator kinerja dan targetnya yang tercantum dalam revisi 1 perjanjian kinerja BRBIH Tahun 2025 di Bulan Desember.

Tabel 31. Sasaran, Indikator Kinerja dan Target pada PK BRBIH Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET PADA PK AWAL	TARGET PADA REVISI PK
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	85	85
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92	92
		3	Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (Nilai)	81,5	81,5
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	71,5	71,5
		5	Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (Indeks)	82	82

	6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	80	80
	7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)	80	80
	8	Nilai PNBP Satker BRBIH (Rupiah)	210.000.000	181.774.000
	9	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai)	90	90

Dalam pelaksanaan kegiatan, adanya kebijakan efisiensi anggaran dan kebutuhan organisasi, dilakukan revisi anggaran yang meliputi revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), revisi kewenangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Berikut tabel yang menggambarkan revisi anggaran BRBIH selama tahun 2025 pada Nomor DIPA 032.12.2.403830/2025.

Tabel 32 Daftar Revisi Anggaran berdasarkan Jenis Revisi

No	Jenis Revisi	Revisi ke-	Pagu Belanja	Tanggal DIPA	Tanggal Revisi	Owner	Digital Stamp
1	DIPA_AWAL	0	10.969.977.000	02-12-2024	02-12-2024	SPAN	8799300304285006
2	POK	1	10.969.977.000	02-12-2024	02-12-2024	SATKER	8799300304285006
3	USULAN_DIPA_REVISI	1	10.969.977.000	02-12-2024	02-12-2024	DJA	7764968772602439
4	DIPA_REVISI	1	10.969.977.000	02-12-2024	21-02-2025	SPAN	7764968772602439
5	USULAN_DIPA_REVISI	2	10.969.977.000	02-12-2024	21-02-2025	DJA	6726307770130246
6	DIPA_REVISI	2	10.969.977.000	02-12-2024	09-04-2025	SPAN	6726307770130246
7	POK	2	10.969.977.000	02-12-2024	09-04-2025	SATKER	6726307770130246
8	USULAN_DIPA_REVISI	3	10.969.977.000	02-12-2024	09-04-2025	SATKER	6726307770130246
9	DIPA_REVISI	3	10.969.977.000	02-12-2024	21-04-2025	SPAN	6726307770130246
10	POK	3	10.969.977.000	02-12-2024	21-04-2025	SATKER	6726307770130246
11	USULAN_DIPA_REVISI	4	10.969.977.000	02-12-2024	21-04-2025	SATKER	6726307770130246
12	DIPA_REVISI	4	10.969.977.000	02-12-2024	08-07-2025	SPAN	6726307770130246
13	USULAN_DIPA_REVISI	5	7.761.516.000	02-12-2024	08-07-2025	DJA	8678191245588557
14	DIPA_REVISI	5	7.761.516.000	02-12-2024	01-09-2025	SPAN	8678191245588557
15	POK	4	7.761.516.000	02-12-2024	01-09-2025	SATKER	8678191245588557
16	USULAN_DIPA_REVISI	6	7.761.516.000	02-12-2024	01-09-2025	SATKER	8678191245588557
17	DIPA_REVISI	6	7.761.516.000	02-12-2024	03-10-2025	SPAN	8678191245588557
18	POK	5	7.761.516.000	02-12-2024	03-10-2025	SATKER	8678191245588557
19	USULAN_DIPA_REVISI	7	7.961.516.000	01-12-2024	02-10-2025	DJA	7513906999126591
20	DIPA_REVISI	7	7.961.516.000	02-12-2024	19-11-2025	SPAN	7513906999126591
21	POK	6	7.961.516.000	01-12-2024	18-11-2025	SATKER	7513906999126591
22	POK	7	7.961.516.000	30-11-2024	17-11-2025	SATKER	7513906999126591

Penyusunan atas Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) BRBIH TA 2026 telah dilakukan pada Bulan Juli 2025 berdasarkan pagu indikatif dan dilakukan revidi oleh Auditor Inspektorat Jenderal secara online. Pada bulan Oktober, berdasarkan pagu definitive kembali dilakukan revidi atas penyesuaian KAK, RAB dan draft RKK TA 2026.

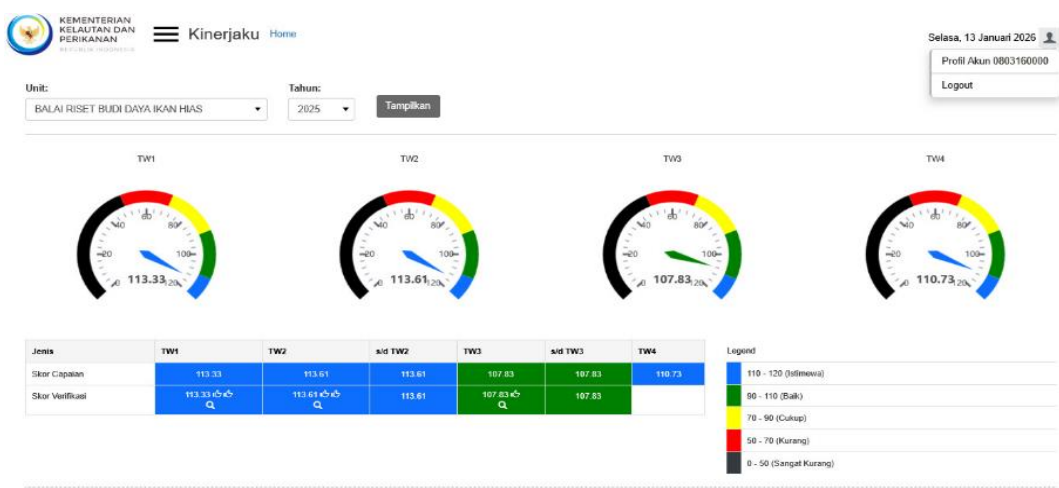
Berdasarkan RKK dan data dukung yang telah direviu oleh Inpektorat, serta proses penganggaran pada eselon I dan proses reviu DJA, pada 1 Desember 2025 terbit DIPA BRBIH TA 2026 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.870.947.000,- yang terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 5.571.957.000,- dan belanja barang senilai 3.298.990.000,-

Pada RKK BRBIH TA 2026, mengacu pada Renja KKP dan Renstra BPPSDM, terdapat 2 program yang dilaksanakan oleh BRBIH yaitu Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan berupa Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDMKP dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Kegiatan berupa Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden.

6. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

BRBIH secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui rapat mingguan dan bulanan. Output dari pelaksanaan layanan pemantauan dan evaluasi adalah 1 dokumen berupa dokumen Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun pertriwulan berdasarkan hasil pengukuran capaian atas target kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BRBIH TA 2025. Pengukuran atas capaian kinerja menggunakan aplikasi Kinerjaku dan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Unit Kerja Eselon I BPPSDMKP berdasarkan data dukung yang ada untuk setiap indikator kinerja yang ditargetkan. Hasil pengukuran kinerja BRBIH pertriwulan berupa Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dapat disampaikan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 5 NKO BRBIH Tahun 2025

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa NKO BRBIH Tahun 2025 bernilai 110.73 yang masuk dalam kategori Istimewa. Nilai ini diperoleh dari tingkat pencapaian target masing-masing IKU yang ditargetkan. Dari sembilan IKU yang ditargetkan, tiga IKU mendapatkan nilai maksimal, yaitu IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, dan Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%). Berikut tabel target dan capaian indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja BRBIH.

Table 33 Tabel Target dan Capaian IK pada PK BRBIH

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	%
Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025					110,73
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	85	85	100,00
		2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92	100	108,70
		3 Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	81,5	84,25	103,37
		4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	71,5	100	120,00
		5 Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	82	88,89	108,40
		6 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	80	100	120,00
		7 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)	80	95	118,75
		8 Nilai PNBPN Satker BRBIH (Rupiah)	181.774.000	194.874.380	107,21
		9 Nilai Keterbukaan Informasi Publik	90	99,05	110,06

Pada layanan pemantauan dan evaluasi juga dilakukan proses penghimpunan dokumen pendukung penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen pendukung yang dikumpulkan dalam penilaian SAKIP pada dilihat pada lampiran I.

Berdasarkan dokumen pendukung penilaian, verifikasi dan validasi oleh Tim SAKIP BPPSDMKP pada Bulan Juni 2025, nilai SAKIP BRBIH Tahun 2025 adalah sebesar 84,25. Hasil penilaian ini tercantum didalam Surat Kepala BPPSDMKP Nomor B.4486/BRSDM.1/RC.510/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 hal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level 3 Lingkup BPPSDM.

7. Layanan Manajemen Keuangan

Layanan Manajemen Keuangan mengakomodir kebutuhan anggaran dalam kegiatan layanan pengelolaan keuangan. Output pada layanan ini telah tercapai berupa 1 Dokumen yaitu Laporan Keuangan dan BMN, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.254.970 atau 98.94% dari pagu anggaran.

Pada awal tahun 2025 Satuan kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias mendapat alokasi APBN sebesar Rp 10.859.709.000,- dengan blokir anggaran sebesar Rp 3.208.461.000,-, sehingga pagu efektif sebesar Rp 7.761.516.000,-. Per 1 September 2025, adanya kebijakan efisiensi anggaran, dilakukan pemotongan anggaran blokir sehingga pagu menjadi Rp 7.761.516.000,-. Pada bulan November 2025 terdapat penambahan anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp 200.000.000,-, sehingga pagu BRBIH hingga 31 Desember 2025 menjadi 7.961.516.000,- dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 33. Komposisi Anggaran Belanja Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)
Belanja Pegawai	4.559.977.000	4.559.977.000
Belanja Barang	6.299.732.000	3.401.539.000
Belanja Modal	10.859.709.000	7.961.516.000

Dalam rangka mendukung kegiatan program riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, penyerapan anggaran dilakukan sesuai dengan perencanaan kebutuhan dan kesiapan operasional baik teknis maupun administrasi sehingga dalam penyerapannya dapat efektif dan tepat guna. Penyerapan ini dilakukan dengan metode pengadaan swakelola atau melalui uang persediaan serta penunjukan langsung.

Penyerapan anggaran dilakukan secara berkala sesuai dengan perencanaan berdasarkan kebutuhan teknis dan kesiapan operasional kegiatan. Penyerapan melalui swakelola dilakukan dengan uang persediaan (UP), ganti uang persediaan (GUP) dan tambah uang

persediaan (TUP), berikut terlampir daftar UP, GUP dan yang telah dilaksanakan selama TA 2025.

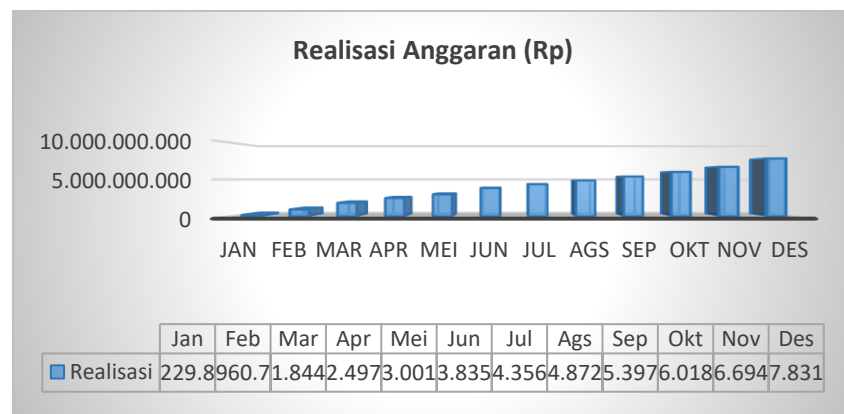
Tabel 34. Daftar UP, GUP dan TUP selam TA 2025

Bulan	Nilai SP2D UP		Nilai SP2D GUP		Nilai SP2D TUP
	KKP	Tunai	KKP	Tunai	
Januari	48.000.000	72.000.000	47.867.995	-	99.300.000
Februari	-	-	77.961.633	139.487.294	31.500.000
Maret	10.000.000	15.000.000	8.804.405	-	186.225.000
April	-	-	8.021.000	40.990.136	99.300.000
Mei	-	-	8.688.467	26.510.300	105.000.000
Juni	-	-	7.205.567	42.323.277	110.000.000
Juli	-	-	14.366.420	29.237.875	110.000.000
Agustus	-	-	9.861.816	23.417.000	110.000.000
September	-	-	20.911.946	29.473.695	120.000.000
Oktober	-	-	21.866.125	44.125.956	120.000.000
November	-	-	48.323.273	41.823.760	-
Desember	-	-	21.856.946	-	478.000.000

Penyerapan yang dilakukan dengan metode penunjukan langsung adalah kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan, kegiatan pemeliharaan yang dilakukan antara lain:

1. Bangunan Gedung kantor Permanen (bertingkat)
2. Bangunan Gedung kantor Permanen
3. Bangunan Gedung Laboratorium Permanen
4. Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen
5. Bangunan Gedung Pos jaga Permanen
6. Bangunan Gedung laboratorium lainnya

Realisasi keuangan Balai Riset Budidaya Ikan Hias dapat terlihat dalam diagram berikut:

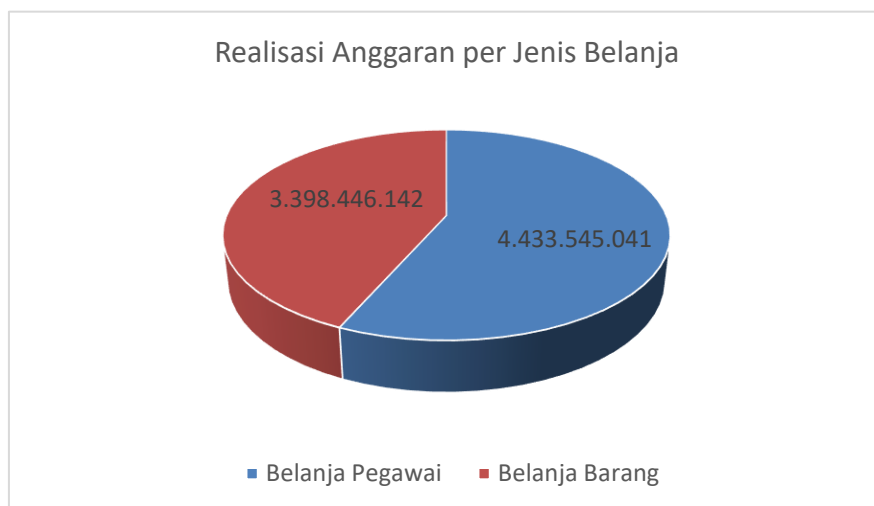


Gambar 6. Grafik realisasi anggaran belanja



Gambar 7. Grafik persentase capaian realisasi keuangan anggaran belanja

Realisasi anggaran per 31 Desember 2025 mencapai Rp7.831.991.183,00 dengan komposisi nilai pencapaian seperti digambarkan dalam grafik di bawah ini.



Grafik 8. Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja

Peningkatan penyerapan anggaran pada tahun mendatang harus terus dilakukan melalui *review* secara berkala dan komprehensif, aspek yang perlu ditekankan adalah perencanaan yang matang dan pengawalan pemanfaatan anggaran itu sendiri.

Disamping kegiatan penyerapan anggaran melalui metode belanja swakelola maupun penunjukkan langsung, pengelolaan keuangan yang telah dilakukan juga didukung dengan adanya koordinasi, konsultasi, rekonsiliasi dengan internal KKP maupun eksternal. Pengelola keuangan telah mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengelola Keuangan level eselon I maupun II KKP ataupun dari KPPN. Keikutsertaan ini tentunya dilakukan agar informasi dan data dapat diupdate sesuai dengan peraturan

dan kebijakan yang berlaku. Mengingat kebijakan efisiensi anggaran, kegiatan dimaksud dilaksanakan secara online menggunakan media rapat daring.

- Penghargaan dan Kegiatan Lainnya

Selama tahun 2025, BRBIH telah menerima beberapa penghargaan dari KKP maupun dari Kementerian/ Lembaga lainnya. Penghargaan tersebut adalah:

- 1) Capaian Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Lingkup KPPN Bogor Periode Semester I Tahun 2025 kategori Satker dengan Nilai Terbaik IKPA Terbaik (100) pada 5 Indikator dengan Bobot 80%



Gambar 8. Piagam Penghargaan dengan Nilai IKPA Terbaik

- 2) Capaian Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Lingkup KPPN Bogor Periode Semester I Tahun 2025 kategori Satker dengan Realisasi Penggunaan UP KKP melebihi target presentase UP KKP disetahunkan



Gambar 9 Piagam Penghargaan Kategori Satker dengan Realisasi Penggunaan UP KKP

- 3) Outstanding Public Service Innovations Kelompok Umum dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Gambar 10 Piagam Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik

Penghargaan ini diperoleh setelah melalui tahapan seleksi tingkat Eselon I, tingkat KKP dan selanjutnya di tingkat Nasional. Inovasi ini dibangun sebagai wadah kolaborasi antara BRBIH, masyarakat sekitar, dan mitra industri (hotel/restoran) untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam pemilahan sampah organik makanan (*food waste*) langsung dari sumbernya. Melalui teknologi biokonversi menggunakan larva *Black Soldier Fly* (BSF), sisa makanan yang semula menjadi beban lingkungan diubah menjadi bahan baku pakan ikan yang bernilai ekonomi. Inovasi ini merupakan bentuk respon nyata terhadap permasalahan sampah organik yang mencapai 45% dari total sampah nasional, di mana sumber tertingginya berasal dari aktivitas rumah tangga.

Hingga tahun 2025, program LFC telah menunjukkan perkembangan signifikan yang mencakup aspek-aspek berikut:

1. Ekosistem Partisipasi: Melibatkan 165 rumah tangga, 4 hotel mitra, dan 12 restoran dalam sistem pemilahan sampah organik secara mandiri.
2. Dampak Lingkungan: Berhasil mengelola dan memanfaatkan food waste terpilah sebanyak 58 hingga 66 ton per tahun, sehingga secara signifikan mengurangi beban pembuangan sampah ke TPA.
3. Kemandirian Bahan Baku Pakan: Menghasilkan produk antara 4-5 ton larva BSF dan turunannya per tahun sebagai alternatif protein terbarukan untuk pakan ikan.
4. Edukasi dan Literasi: Pelaksanaan 18 workshop dan puluhan kunjungan studi yang telah mengedukasi ribuan peserta mengenai pentingnya ekonomi sirkular.

Berikut adalah uraian mendalam mengenai mekanisme kerja, capaian indikator, serta dampak sosial-ekonomi dari inovasi LoCa Feed Community yang telah diimplementasikan:

a) Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Inovasi

Keberhasilan inovasi ini tercermin dari perubahan signifikan pada perilaku masyarakat dan efektivitas pengelolaan limbah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 35. Dampak Inovasi LFC BRBIH

Indikator	Sebelum Inovasi	Setelah Inovasi
Kesadaran masyarakat dan industri terkait <i>food waste</i>	Belum mengetahui dampak, cara pemilahan dan pengelolaan <i>food waste</i>	memahami dampak, potensi, cara pemilahan dan pengelolaan <i>food waste</i>
Jumlah partisipan LFC	Belum ada partisipan yang terlibat	Partisipasi masyarakat: 65 rumah tangga, 5 komunitas (100 rumah tangga) Partisipasi industri: 4 hotel, 13 restoran
Volume <i>food waste</i> yang diolah/dimanfaatkan	Belum ada pemanfaatan sampah organik	<i>Food waste</i> yang berhasil dikelola 58-66 ton/ tahun
Produk hasil pengelolaan <i>food waste</i>	Belum ada produk yang dihasilkan.	Menghasilkan 6 produk: larva BSF, pelet ikan, LoCaFeed kering, tepung, minyak LarvaBSF, granul pupuk organik

Indikator	Sebelum Inovasi	Setelah Inovasi
Pemanfaatan produk pengelolaan <i>food waste</i>	Belum ada pengelolaan <i>food waste</i> yang dimanfaatkan kembali	Pakan ikan / unggas, bahan baku pakan, pupuk organik
Komunitas peduli	Belum ada komunitas peduli <i>food waste</i>	Terbentuk komunitas <i>food waste</i>
Dampak terhadap lingkungan dan ekonomi	Tidak peduli dengan <i>food waste</i> yang dibuang ke lingkungan	Mulai tercipta kepedulian

b) Dampak Strategis dan Keberlanjutan

Implementasi LFC tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mendukung target-target pembangunan nasional (SDGs) dan Asta Cita:

1. Pemberdayaan SDM
Memberdayakan kelompok perempuan (PKW) dan pemuda melalui pelatihan teknik biokonversi dan pembuatan pakan mandiri.
2. Efektivitas Lingkungan
Mengurangi emisi karbon dan metana dari sampah organik serta mengurangi beban biaya iuran sampah di tingkat komunitas.
3. Kemandirian Pangan
Mendukung ekonomi biru dengan menyediakan bahan baku pakan lokal, sehingga mengurangi ketergantungan pembudidaya pada pakan komersial.
4. Keberlanjutan Manajerial
Didukung oleh SOP produksi yang ketat dan sistem monitoring berbasis aplikasi digital (<https://lfc.balaiikanhias.online/>) untuk memantau volume sampah secara *real-time*

Keberhasilan inovasi LoCa Feed Community (LFC) dalam mengintegrasikan pengelolaan lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat telah mendapat pengakuan luas di tingkat nasional. Puncaknya, inovasi ini berhasil terpilih sebagai salah satu pemenang dalam kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Pencapaian ini mengukuhkan posisi BRBIH sebagai unit kerja yang mampu menghasilkan solusi konkret, aplikatif, dan berdampak luas bagi masyarakat serta lingkungan.

Salah satu pilar utama kekuatan inovasi ini terletak pada aspek pemberdayaan perempuan, khususnya ibu-ibu rumah tangga di lingkungan sekitar BRBIH. Melalui komunitas LFC, para ibu berperan aktif sebagai motor penggerak dalam:

- **Pemilahan Sampah Mandiri:** Melakukan pemilahan sisa organik makanan langsung dari dapur rumah tangga untuk memastikan bahan baku biokonversi tidak tercampur sampah lain.
- **Edukasi Komunitas:** Menjadi agen perubahan yang menyebarluaskan kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan limbah organik kepada lingkungan sekitar.
- **Peningkatan Ekonomi Keluarga:** Memanfaatkan produk turunan biokonversi, seperti pupuk organik, untuk mendukung kemandirian pangan skala rumah tangga maupun sebagai peluang usaha baru.

Keterlibatan aktif kelompok perempuan dan industri dalam mengelola 58–66 ton sampah organik per tahun mempertegas peran BRBIH dalam membangun ekosistem ekonomi sirkular yang inklusif. Ke depan, BRBIH berkomitmen untuk memperkuat skalabilitas inovasi LFC dan menjaga konsistensi transparansi informasi publik. Dengan fondasi kinerja yang akuntabel dan berorientasi pada masyarakat, BRBIH optimis dapat terus memberikan kontribusi strategis bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAKLANJUT

A. Permasalahan

Pada tahun 2025, seluruh output kegiatan telah tercapai ditengah kebijakan efisiensi anggaran. Kebijakan efisiensi anggaran di tahun 2025 menyebabkan pelaksanaan layanan berjalan dengan anggaran kegiatan yang minim, bahkan sangat jauh dibawah Satuan Biaya Keluaran Umum (SBKU) untuk RO Generik.

Salah satu akibat yang ditimbulkan dari adanya kebijakan efisiensi anggaran adalah tidak maksimalnya pemeliharaan asset salah satunya gedung dan bangunan. Anggaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan yang semula dianggarkan mengalami pemotongan dan di akhir bulan November kegiatan pemeliharaan ini baru dapat dilaksanakan dengan adanya kebijakan penambahan anggaran dari Unit Kerja Eselon I.

B. Rencana Tindaklanjut

Melihat kondisi permasalahan yang ada, maka rencana tindaklanjut atas permasalahan tersebut adalah perlunya pengalokasian anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan untuk mengakomodir kebutuhan renovasi gedung dan bangunan yang belum diakomodir pemeliharaannya di akhir tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Balai Riset Budidaya Ikan Hias senantiasa terus berusaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai pada tahun ini diharapkan dapat dipertahankan. Untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Balai, masih terdapat beberapa yang perlu dilakukan perbaikan sarana dan prasarana, dukungan seluruh SDM yang ada dan masyarakat sekitar, melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara terintegrasi.

Dengan disusunnya Laporan Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada institusi maupun seluruh pihak yang terkait dengan program dan kegiatan BRBIH, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya dalam rangka lebih memberikan manfaat kepada masyarakat maupun kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

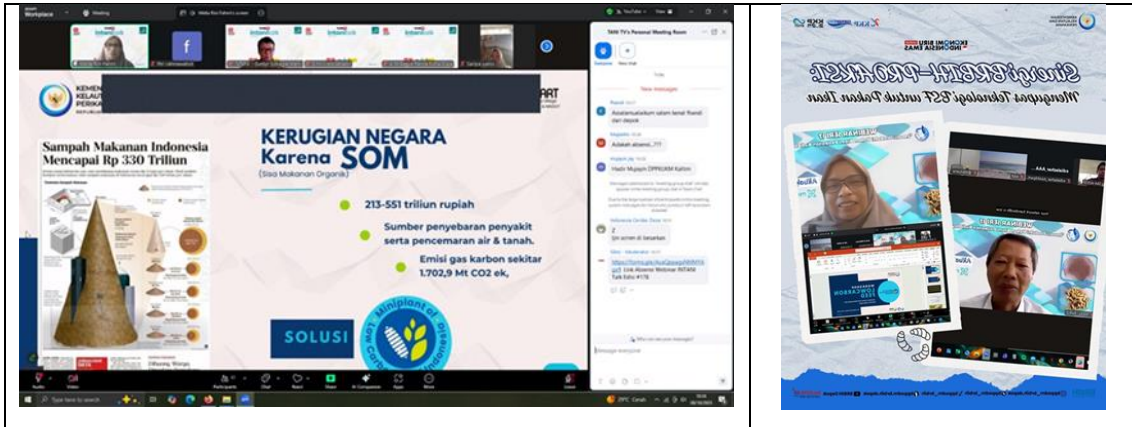
Lampiran 1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

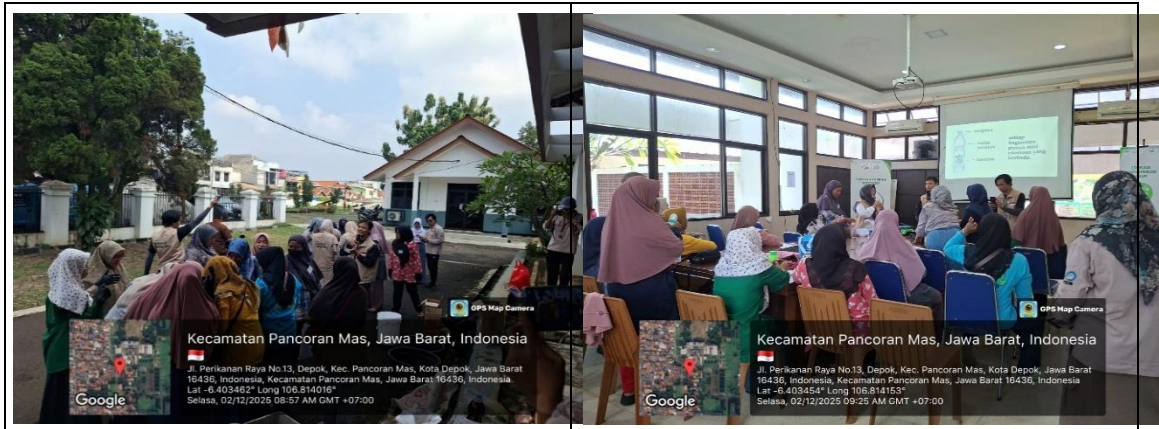
Kegiatan Pelatihan/Workshop/ Sebagai Tamu Undangan Narasumber



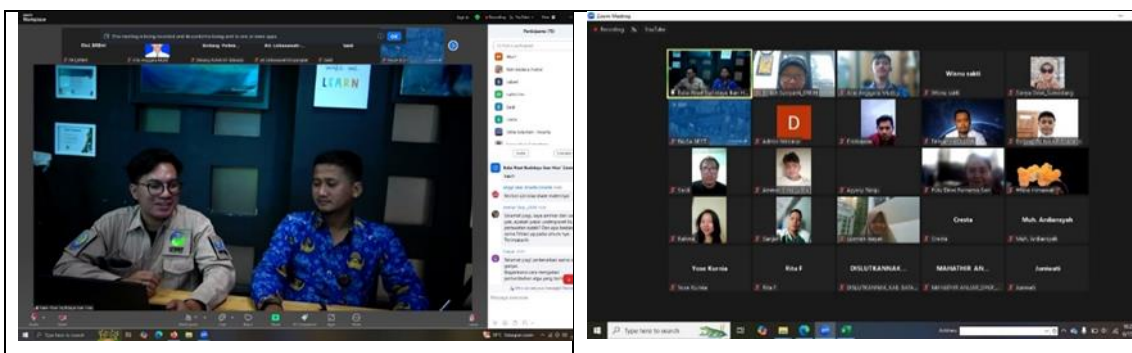


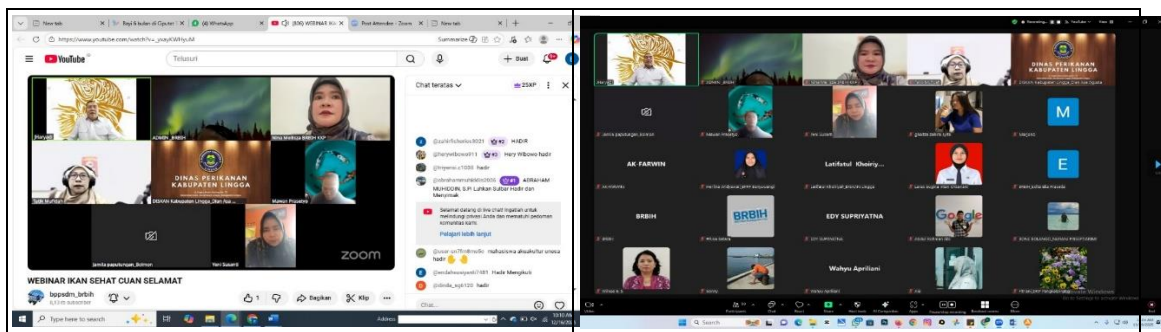






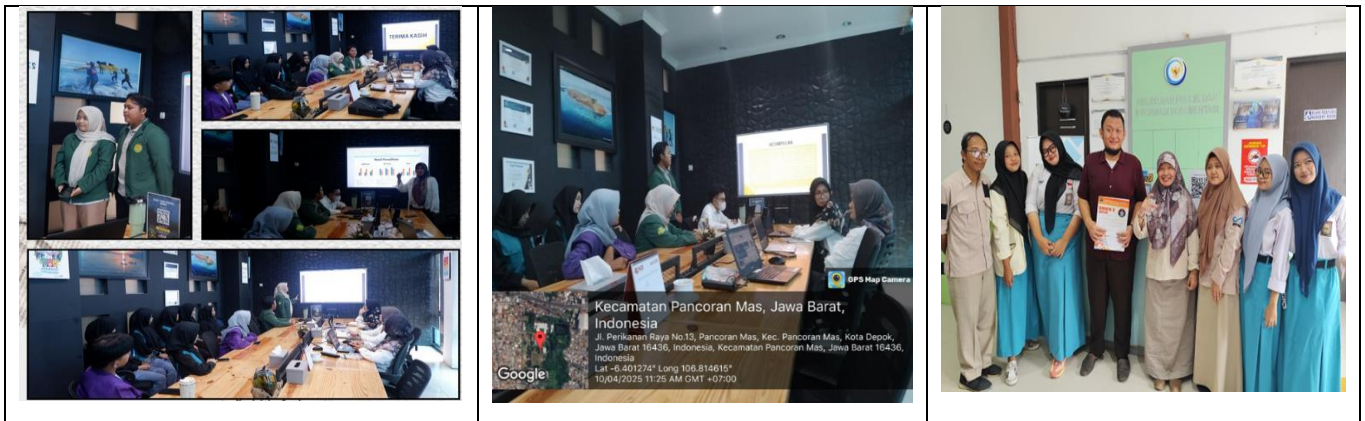
Kegiatan Webinar



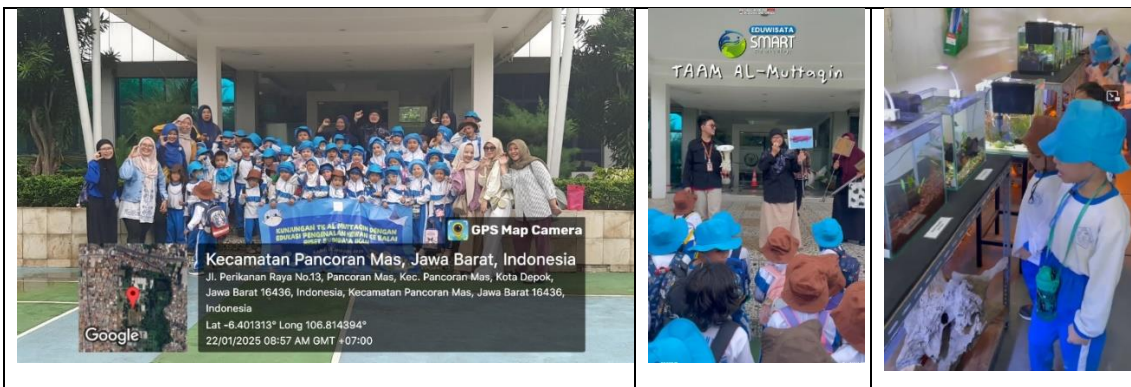


Kegiatan Permagangan





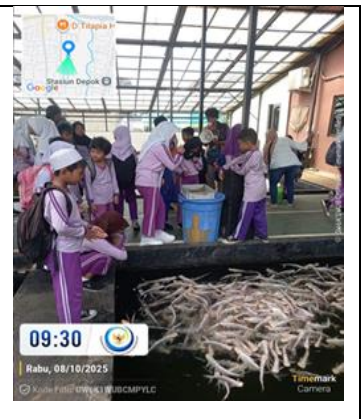
Kegiatan Pengenalan Ikan Hias Pakan (Kunjungan / Eduwisata)



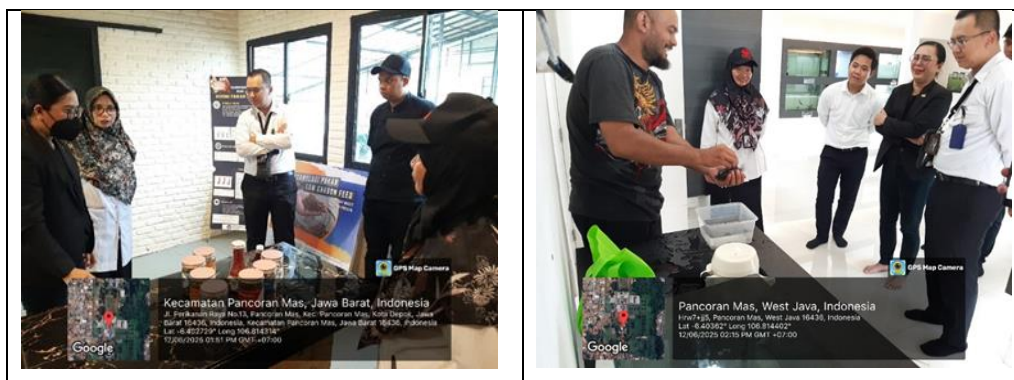
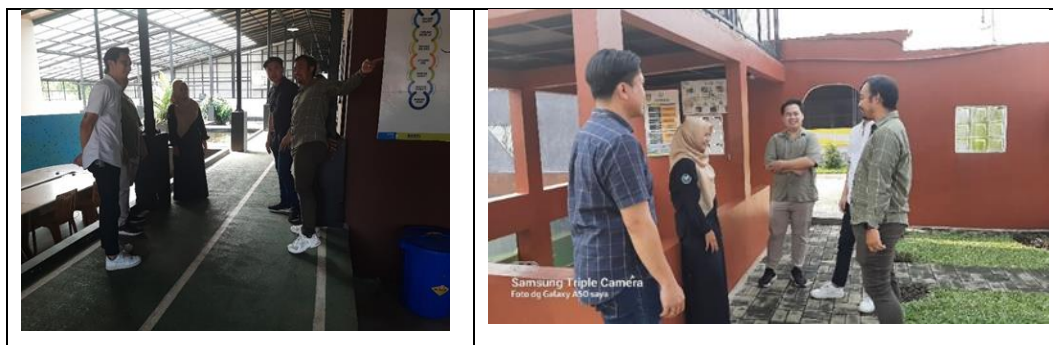








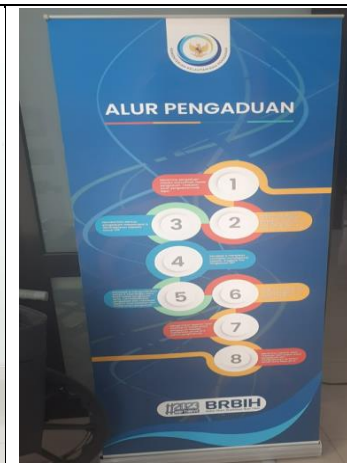
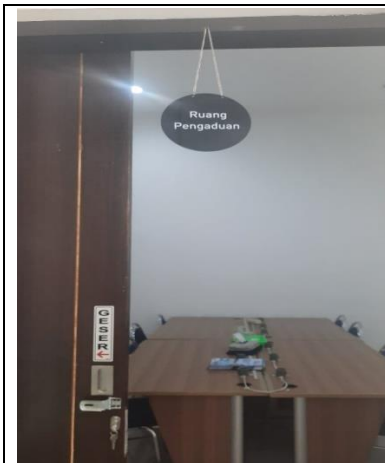




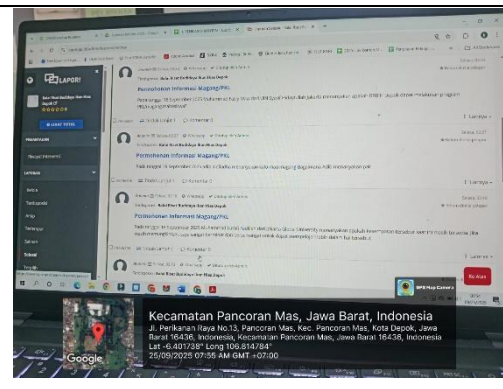
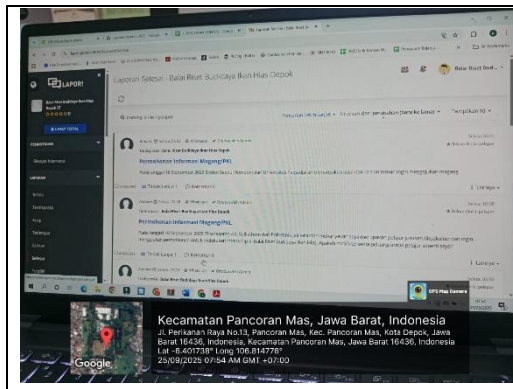




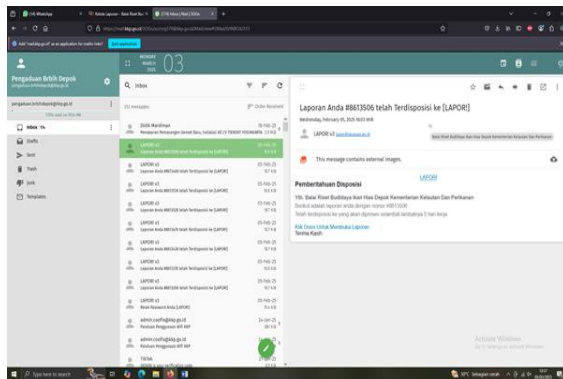
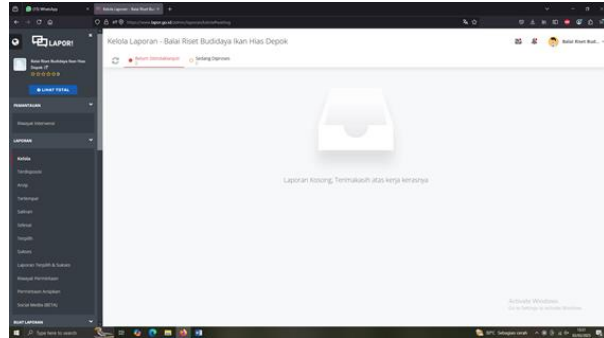
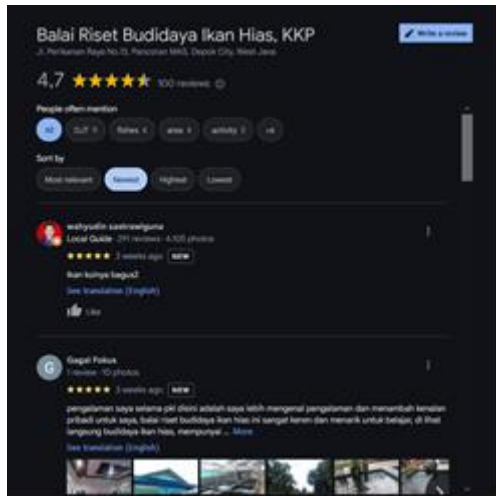
Ruang Pengaduan, Petugas, Alur Pengaduan



SP4N LAPOR



Saluran Pengaduan



Gratifikasi



TANDA TERIMA

Telah diserahkan kue pandan topong keju Bunga Bakery ukuran 20 x 20 cm dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias untuk anak-anak yatim kepiatu kepada :

Yayasan	: P.p. Zumaratul Huda
Alamat	: Jln. Cagar dan Selatan 60. Balong Sari II. Pancoran
No. Telepon	: 083234501699.

Penerima
Tanggal: 12/11/2025

Nama: *Shekwin*

Kecamatan Pancoran Mas, Jawa Barat, Indonesia
Gg. Balong Sari II No.11 02/05, Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16436, Indonesia, Kecamatan Pancoran Mas, Jawa Barat 16436, Indonesia
Lat: -6.4102833 Long: 106.819997
Rabu, 12/11/2025 04:35 PM GMT +07:00

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

INFORMASI ATAS LAPORAN GRATIFIKASI
Nomor : 0013-202511-07333-BIG-NL
Tanggal : 12 November 2025

Yth. Saudara Feli Fahmawati
Staf Pelayanan Teknis
Badan Penyelidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Selubungan dengan laporan gratifikasi:

Nomor SIG	: 1.0013-202511-07333-BIG
NIK	: 307304630/010003
Email Korporasi	: fahmawati@gmail.com
Tanggal Laporan ke KPK	: 12 November 2025

Ringkasan Gratifikasi

No. Gratifikasi	Tanggal Penyerahan	Uraian Gratifikasi	Nilai Estimasi	Status Gratifikasi
0013-202511-07333-BIG-001	12 November 2025	Kue	Rp101.000,00	Pasal 6 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi karena telah melakukan langkah konkret dalam upaya pencegahan korupsi. Selanjutnya kami mengimbau agar menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan befungsi dengan kewajiban atau tugas Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, kecuali adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kepiatu sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktori Gratifikasi dan Pelayanan Publik
Komisi Pemberantasan Korupsi



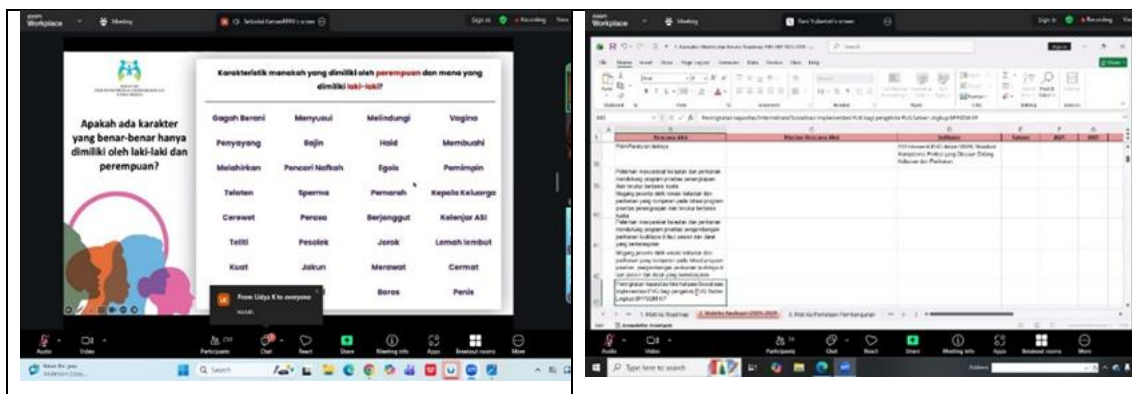
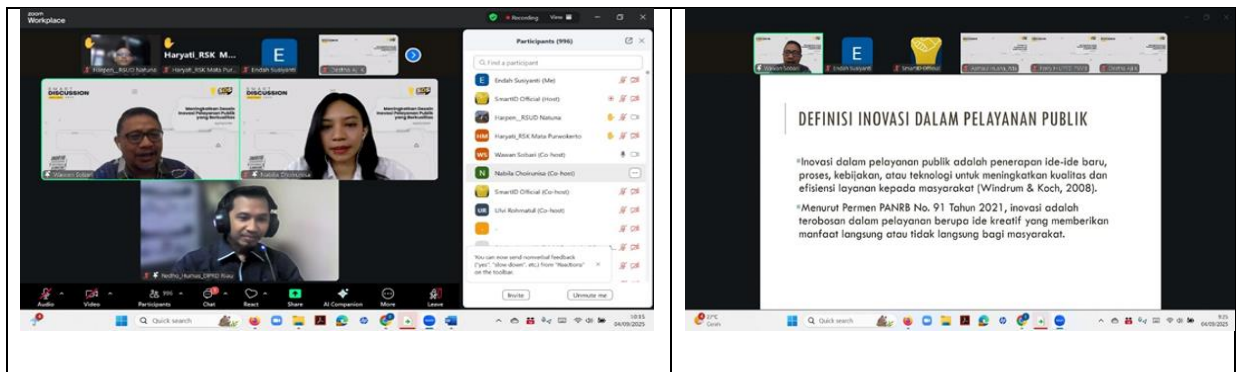
Dokumentasi dan Tanda terima, kue telah disalurkan ke tempat sosial, diterima oleh Yayasan Yatim Piatu Baitul Marjan di Jl. Pramuka Raya Gg Siun oleh Ustadz Ariyanto. Setelah diserahkan dibuatkan laporan ke KPK dan telah menerima balasan

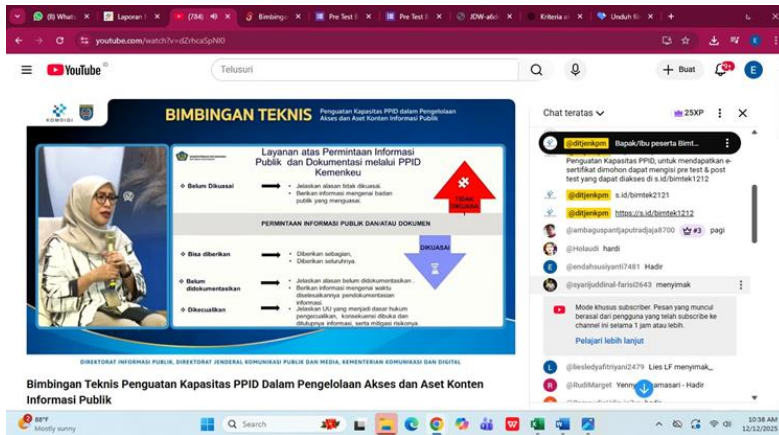
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi



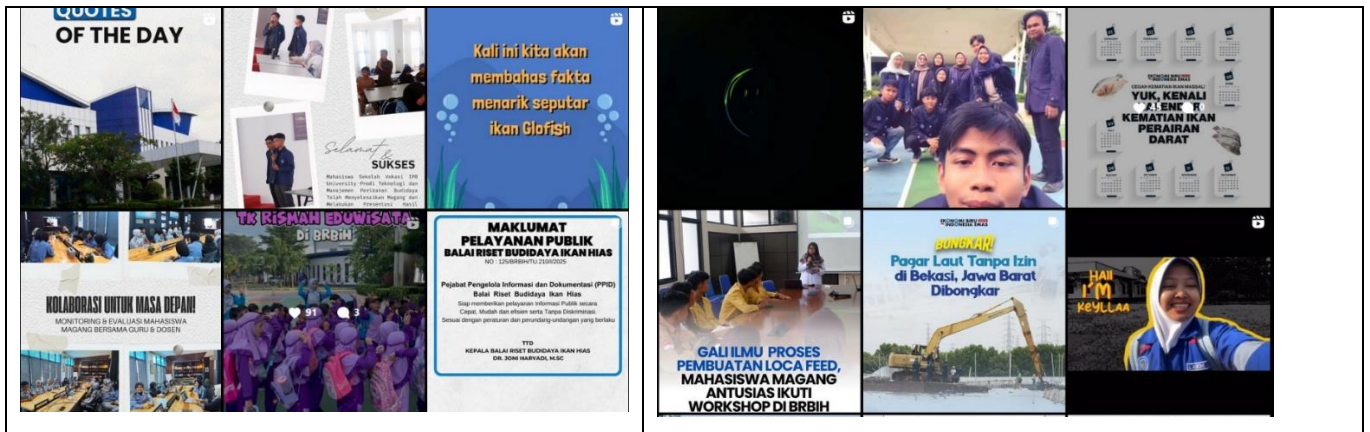


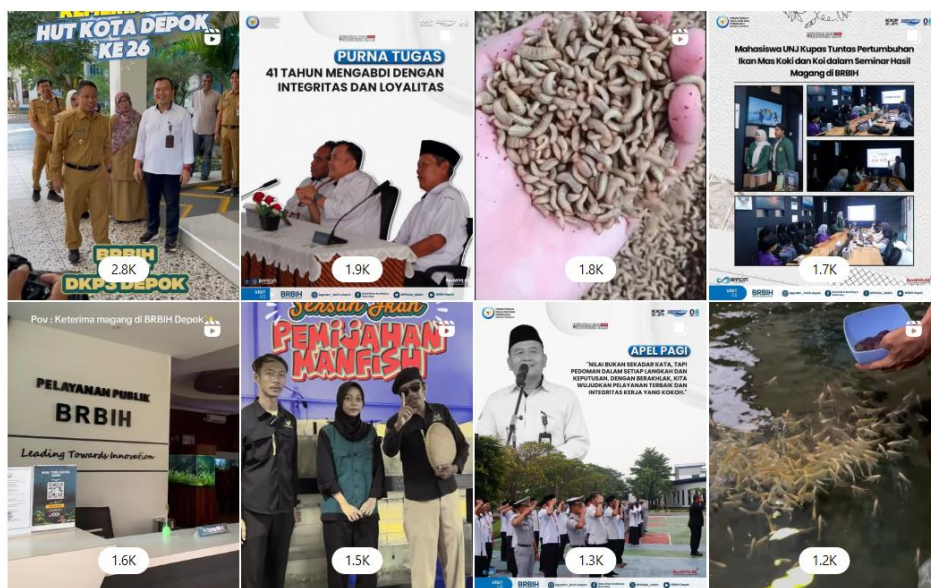
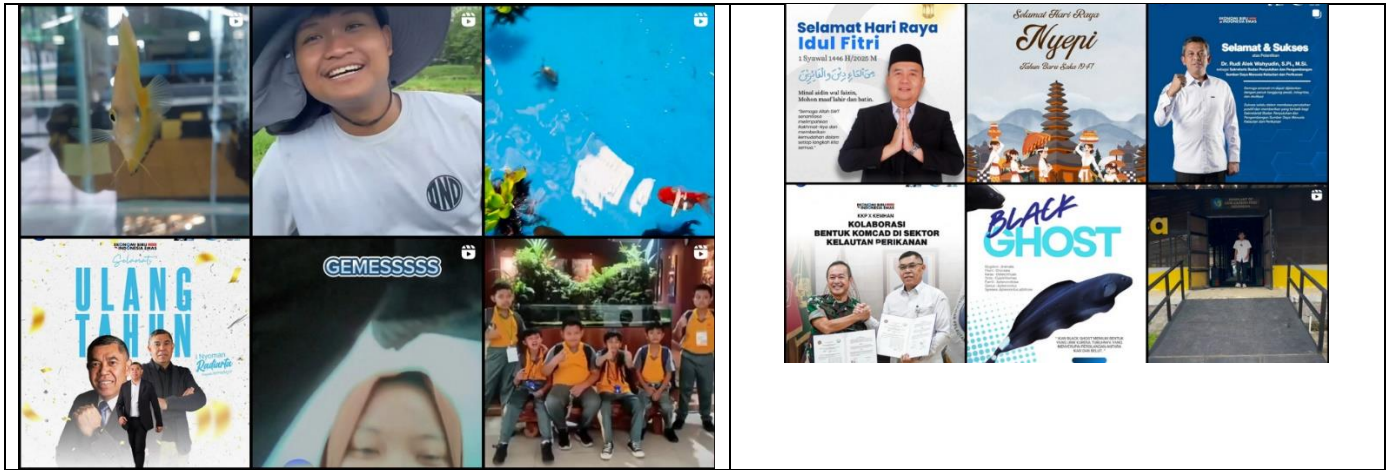
Pelatihan Untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia BRBIH



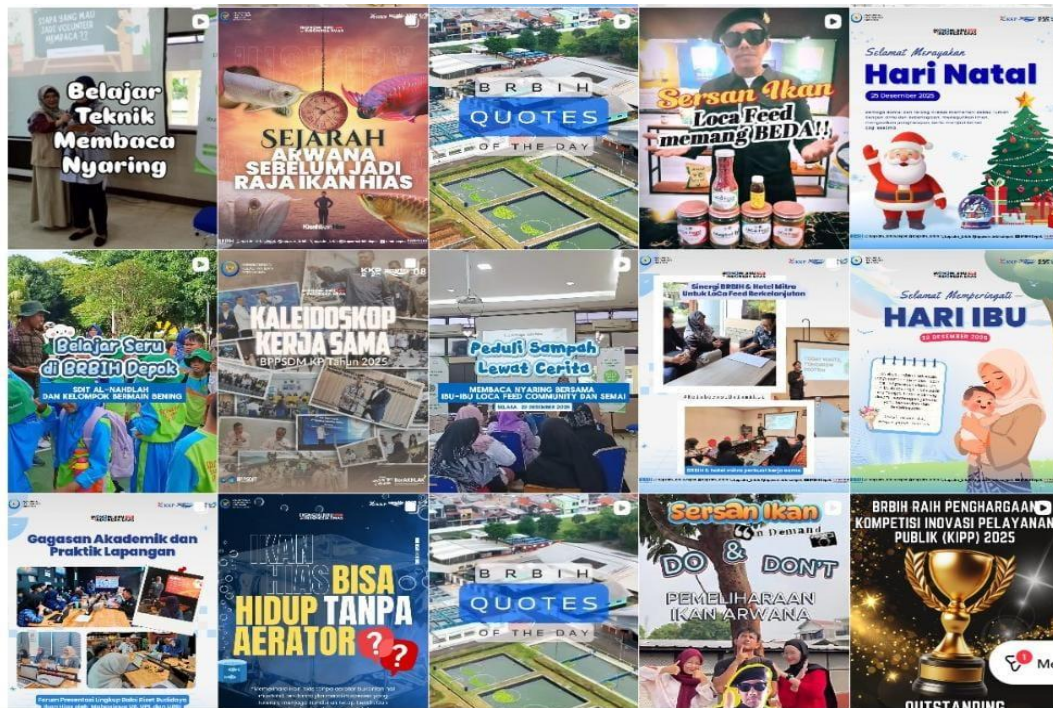
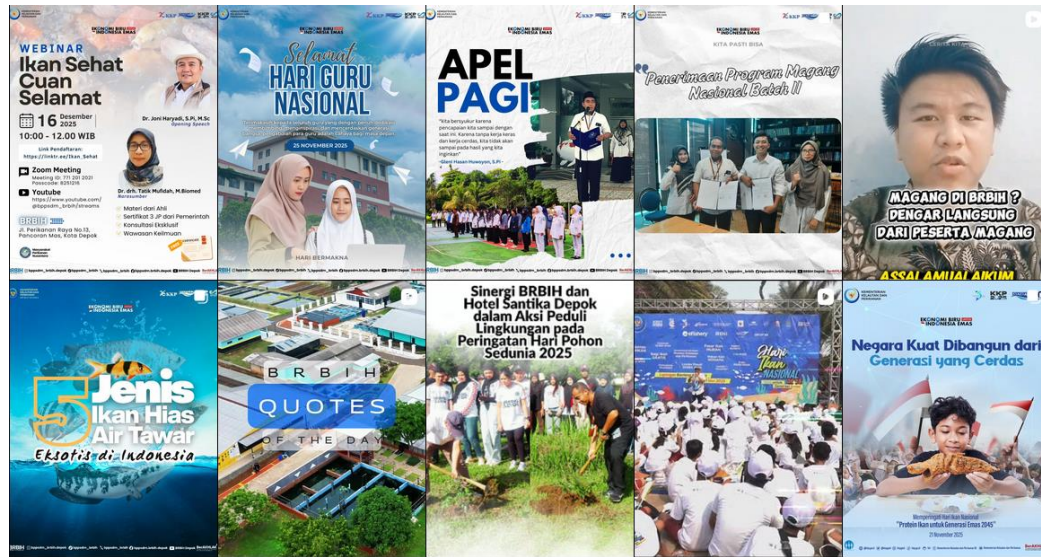


Tayangan di Media Sosial









Artikel pada Website BRBIH



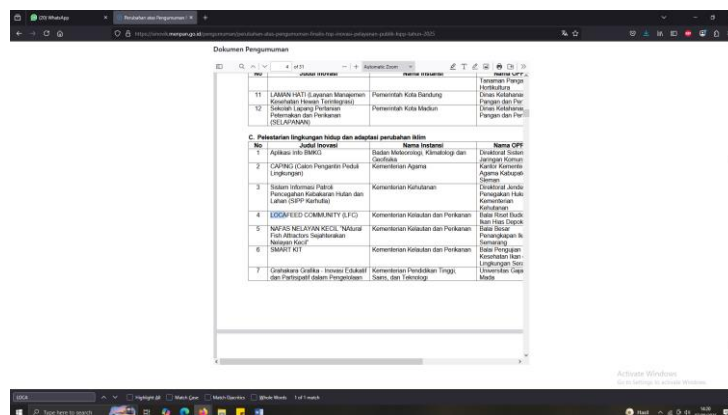
Kerjasama Dengan Instansi Pemerintah Atau Swasta





Inovasi Pelayanan Publik

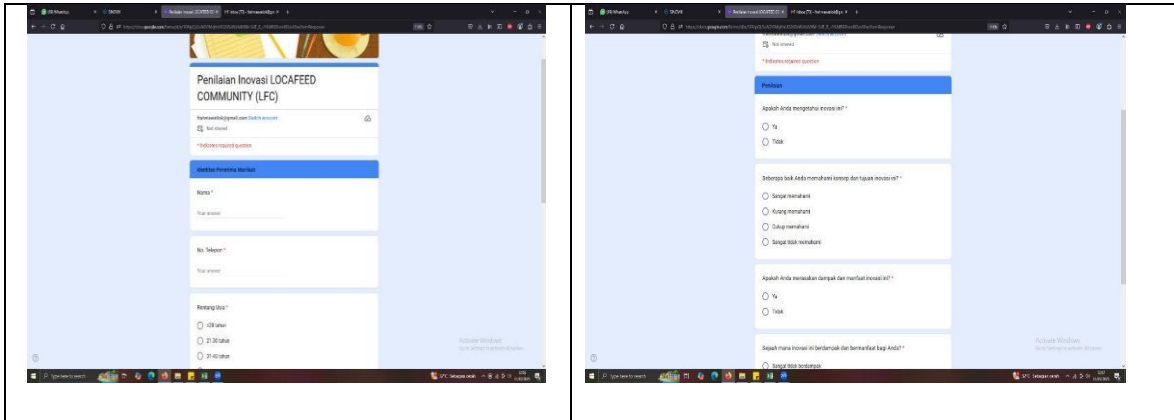
<https://sinovik.menpan.go.id/pengumuman/perubahan-atas-pengumuman-finalis-top-inovasi-pelayanan-publik-kipp-tahun-2025>



Dan telah submit Video dan Penilaian oleh Masyarakat :

Video: <https://www.instagram.com/p/DMhh9ObTMRv/?hl=en>

Penilaian Masyarakat : <https://sinovik.menpan.go.id/penilaian-masyarakat>



KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pengumuman

Pengumuman Outstanding Public Service Innovations KIPP Tahun 2025

15 August 2025

Berdasarkan Pengumuman Nomor B/277/PP.00.05/2025, Ketua Tim Sekretariat mengumumkan Outstanding Publ...

3. Kategori Pelestarian Lingkungan Hidup dan Adaptasi Perubahan Iklim

No	Judul Inovasi	Nama Instansi	Nama OPP	Tipe Instansi
1.	LOCAFEED COMMUNITY (LFC)	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok	Kementerian/Lembaga
2.	Pemuda Cinta Bahari Anti Bom dan Bius Ikan (PACARITA)	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Cabang Dinas Kelautan Pangkep, Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi
3.	Strategi Pembentukan Kampung Iklim sebagai Bentuk Mitigasi Perubahan Iklim Menuju Smart Environment (SUPERMIE)	Pemerintah Kota Madiun	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten/Kota

Pengumuman Outstanding Public Service Innovations KIPP Tahun 2025

Published on: August 15, 2025

Views: 3872



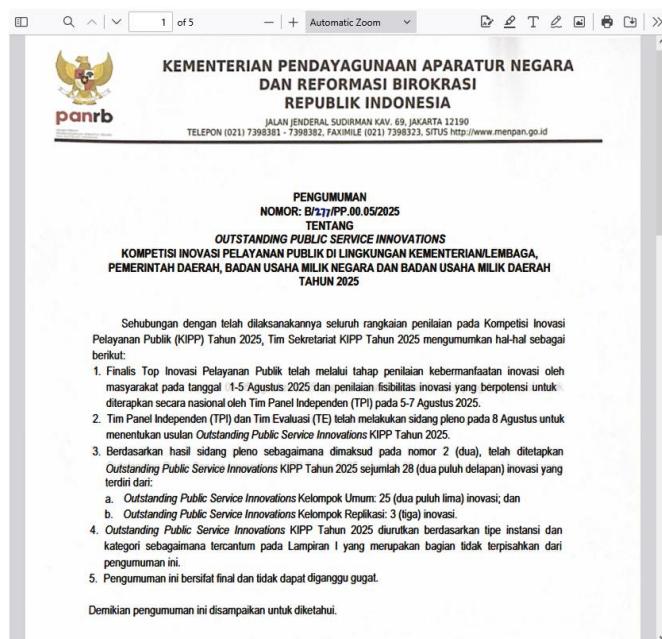
Berdasarkan Pengumuman Nomor B/277/PP.00.05/2025, Ketua Tim Sekretariat mengumumkan *Outstanding Public Service Innovation* Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025. Seluruh peserta dapat melihat hasil penilaian melalui akun masing-masing.

Selamat atas prestasi yang diraih dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam gelaran KIPP tahun 2025.

Salam,

Tim Sekretariat KIPP Tahun 2025.

Dokumen Pengumuman



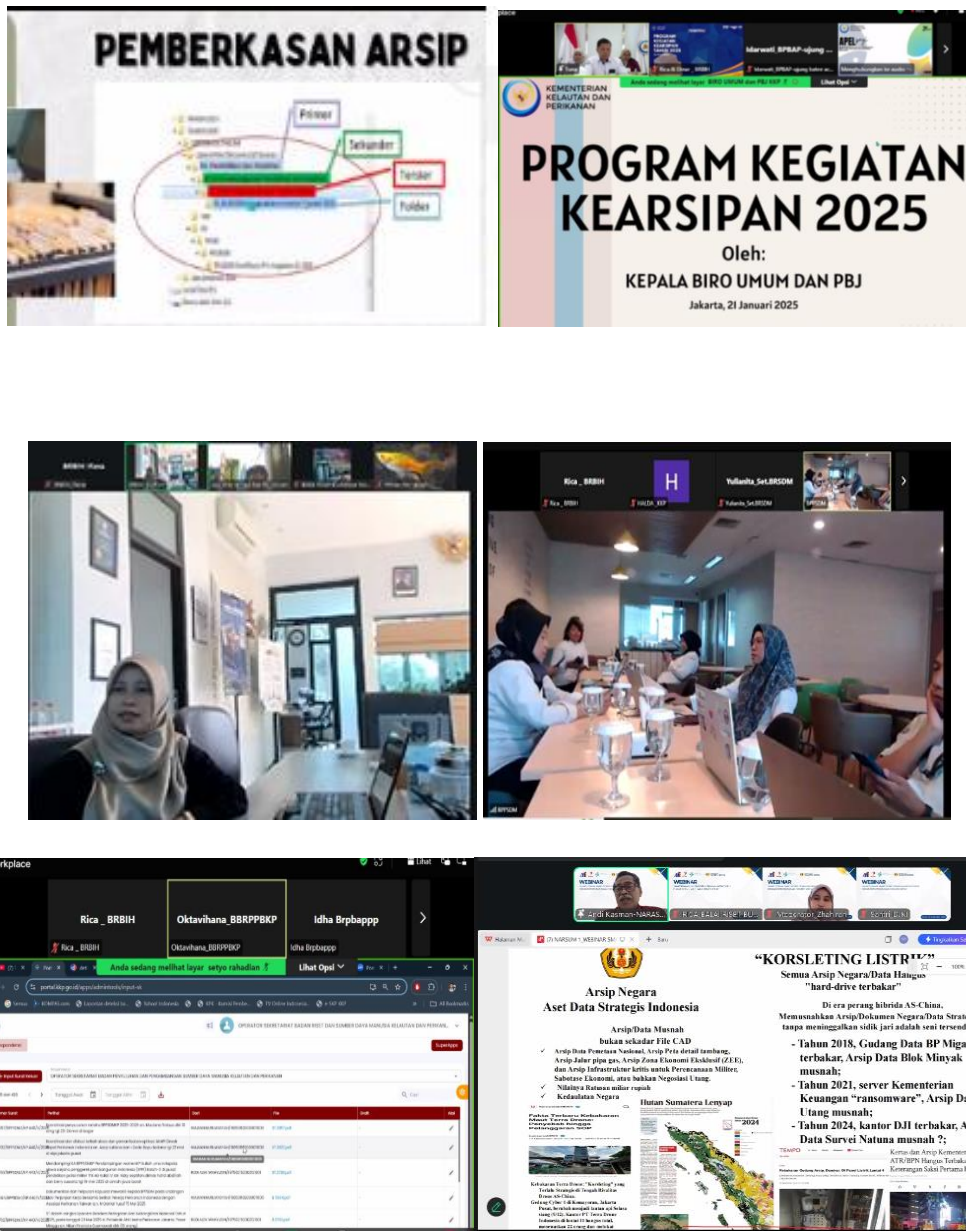
Kegiatan Khusus Promosi







Lampiran 2. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan pada Layanan Umum

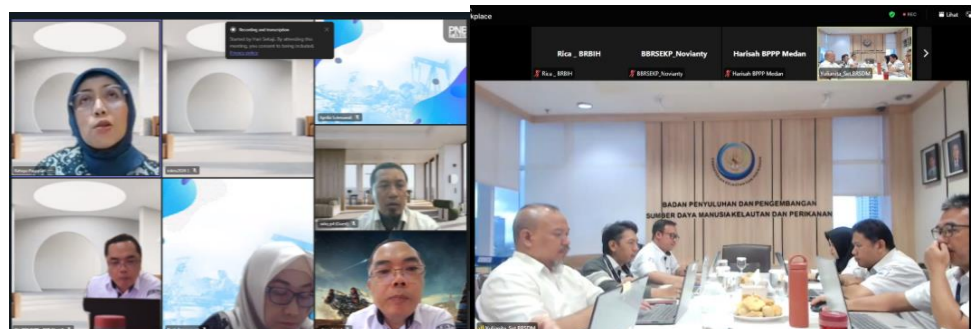
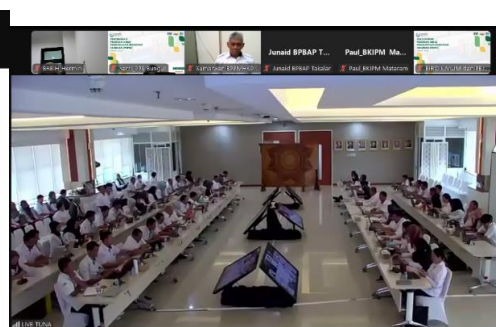


Lampiran 3. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan pada Layanan Perkantoran

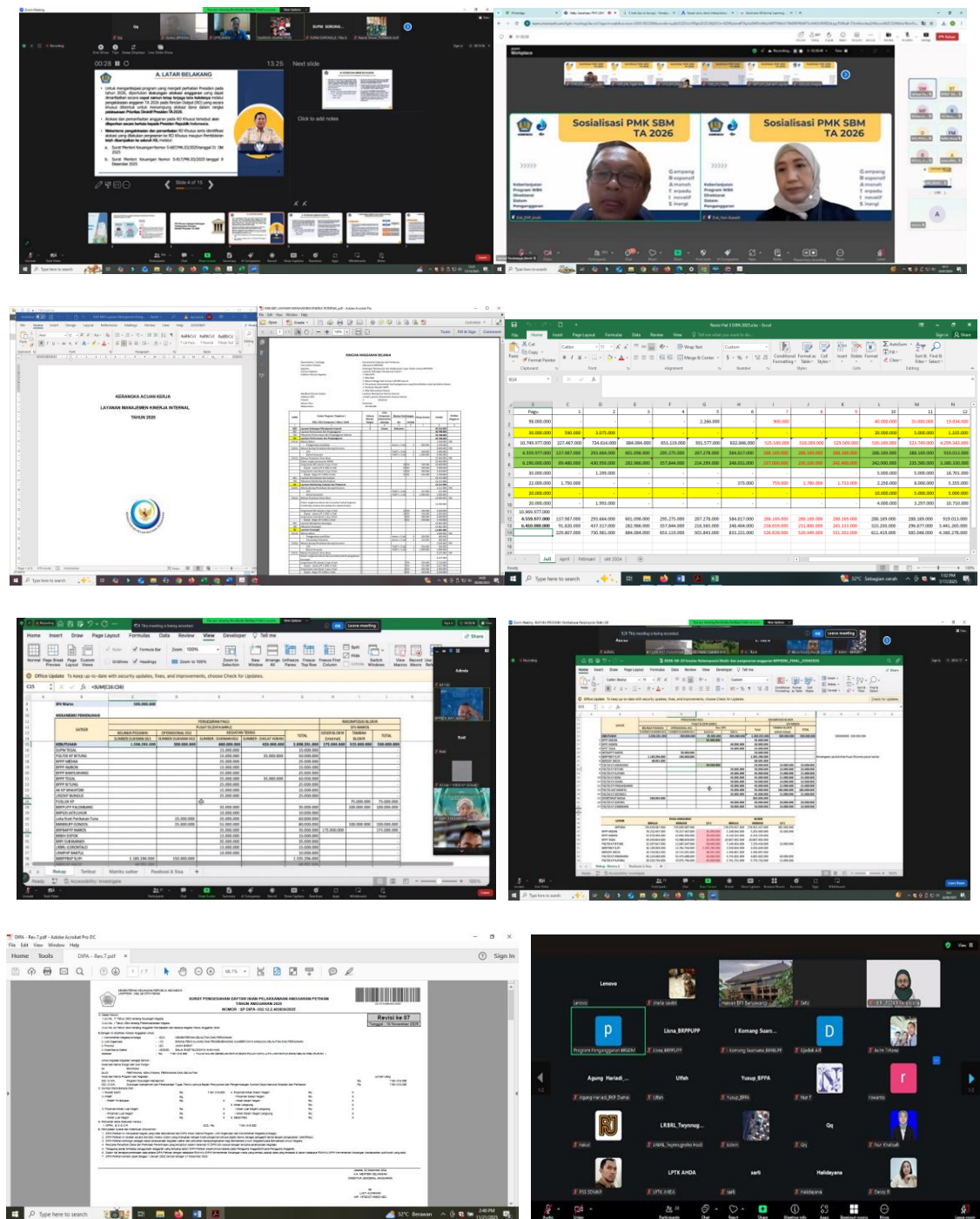




110

[illegible]

Lampiran 5. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan pada Layanan Perencanaan dan Penganggaran



DAMPAK DARI PENGHAPUSAN BLOKUR untuk kegiatan Modernisasi Sarana Pendidikan :

1. Terdapat RO yang hilang, sehingga IKU yang terkait akan hilang
2. Terdapat Pengurangan Volume, sehingga Target IKU turun
3. Terdapat Penambahan Volume Sarana Prasarana, sehingga Target IKU Sarpras naik
4. Perubahan PK dari Level 1 sampai Level 3 (Menunggu Rantira di SAKI) dan / dilakukan segera sebelum pengakuan TWI BPPD
5. IKU Dikura yang sudah ada Capaiananya, meskipun RO hilang, IKU nya tetap dicantumkan dalam PK revisi 1997
6. Jika PK sudah di revisi, maka rencana akan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
7. Jika terdapat IKU yang anggarannya hilang, maka dalam anggarannya digabungkan dengan IKU lainnya.

india set BPPSDM

BPPSDM BPPSDM

Lampiran 6. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan pada Layanan Monitoring dan Evaluasi

The collage consists of six screenshots documenting the implementation of monitoring and evaluation activities:

- Top Left:** A presentation slide titled "Pengelolaan Kinerja Organisasi" (Organizational Performance Management) showing a circular diagram with four quadrants: "Pengelolaan Kinerja", "Pengelolaan Risiko", "Pengelolaan Sumber Daya", and "Pengelolaan Keuangan".
- Top Right:** A presentation slide titled "Hasil PM SAKIP Level 2 lingkup BPPSDMKP Tahun 2025" (Results of PM SAKIP Level 2 for BPPSDMKP 2025). It includes a table with columns: No., Sifat, Target IKU, Hasil Penilaian Mandiri, and Keterangan. The table lists four items with target and actual scores, all rated 'A'.
- Middle Left:** A screenshot of a web application interface for "NK Perencanaan Eselon I" (NK Planning for Level I Officials), showing a table with columns for "No.", "Nama", "Jabatan", "Masa Kerja", "Masa Kerja", "Masa Kerja", and "Masa Kerja".
- Middle Right:** A photograph of a group of people sitting around a table in a meeting room, engaged in a discussion.
- Bottom Left:** A screenshot of the "e-Kinerja" (e-Performance) system interface, showing a table with columns for "No.", "Indikator Kinerja", "Rencana Aksi", "Pagu Anggaran", "Bulan", "Target", "Status", "Realisasi Anggaran", "Realisasi Volume", "Peningkatan Realisasi", "Link Data Dukung", "Perencanaan", and "Revisi".
- Bottom Right:** A screenshot of a presentation slide titled "Kementerian Kelautan dan Perikanan" (Ministry of Marine Affairs and Fisheries), showing a line graph of "Rumus 5 Tahun Anggaran 2025" (5-Year Budget Formula 2025) and a table of "Progres Realisasi 2025" (2025 Realization Progress).

Daftar dokumen pendukung penilaian SAKIP

Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Kinerja
PermenKP No 68/2017	Manual IKU	LKj	Pedoman Evaluasi AKIP BPPSDM
PermenKP No 35/2023	SOP	Data Dukung LKj	Keputusan Kepala BPPSDM No.580 ttg Petunjuk Pelaksanaan Rekonsiliasi Kinerja
Renstra	LKj	Hasil Reviu LKj	Pedoman Evaluasi AKIP KKP
Renja	Data Dukung LKj	Tangkapan Layar Publikasi LKj	Pedoman Monev BPPSDMKP
Perjanjian Kerja	Dokumentasi Arahan Pimpinan	Surat Penyampaian LKj	Dokumentasi kegiatan pencapaian kinerja
Rencana Aksi	Kertas Kerja Evaluasi Andal	KKE Andal	Laporan Penilaian Mandiri SAKIP
DIPA & RKKL	Hasil Reviu LKj	Verifikasi Capaian Kinerja	SK Tim Pengelola SAKIP dan Sertifikat per anggota Tim
Matriks Peran Hasil (MPH)	Hasil Verifikasi Pengukuran Kinerja	Kertas Kerja Perbandingan Target Tahunan	Tangkapan Layar Aplikasi SAKIP
Sasaran Kinerja Pegawai	Tangkapan Layar Publikasi LKj	Kertas Kerja Perbandingan Target Jangka Menengah	Laporan Rekonsiliasi Kinerja
Bukti Publikasi Dokumen Kinerja	Bukti upaya mencapai kinerja	Kertas Kerja Perbandingan Target Tahun Sebelumnya	Bukti upaya baru dalam pemenuhan kriteria berupa Gsheet monitoring mingguan
Manual IKU	Tangkapan Layang Kinerjaku	Kertas Kerja Benchmark Kinerja	Evaluasi Renaksi
SK IKU	Tangkapan Layar Upload LKj	Kertas Kerja Keberhasilan	Tindaklanjut rekomendasi pada evaluasi renaksi
Kertas Kerja Analisis SMART	PermenKP tentang Tunjangan Kinerja	Kertas Kerja Efisiensi	

Tabel Perbandingan IKU	Rekap Pembayaran Tunjangan Kinerja per nama pegawai	Kertas Kerja Perbaikan Kinerja	
Dokumentasi Dialog Kinerja	Kertas Kerja Efisiensi	Kuesioner Pelaporan Kinerja	
Kertas Kerja Evaluasi Capaian Kinerja	SK Tim Pengelola SAKIP	Hasil Kuesioner Laporan Kinerja	
Pohon IKU	Kuesioner pengukuran kinerja	Rincian Responden Laporan Kinerja	
Tangkapan Layar Kinerjaku	Hasil Kuesioner pengukuran kinerja	Bukti Dialog Kinerja	
Laporan Kinerja	Rincian responden pengukuran kinerja	Kertas Kerja Efisiensi Anggaran	
Rekapitulasi Tindaklanjuti LKj		Rekapitulasi Tindaklanjuti LKj	
Evaluasi Renaksi		Kertas Kerja Evaluasi Pencapaian	
Data Dukung Tindaklanjuti Evaluasi Renaksi		Rekapitulasi Tindaklanjuti LKj	
		DIPA & RKKL	
		Kertas Kerja SMART	
		Rekap TL LKj	
		Prognosa Kinerja	
		Refleksi Outlook	
		Dokumentasi arahan Pimpinan	
		Inovasi Budaya Kinerja	
		Kertas Kerja Evaluasi Pencapaian	

Lampiran 7. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan pada Layanan Manajemen Keuangan

